

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BLORA  
MENURUT LAPANGAN USAHA**

**2013-2017**



**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora  
Menurut Lapangan Usaha  
2013 - 2017**

**Katalog BPS : 9302008.3316**  
**Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm**  
**Jumlah Halaman : 90 halaman**  
**Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Penyunting :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Perancang Sampul :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Diterbitkan :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bora Menurut Lapangan Usaha 2013- 2017 dapat disajikan. Publikasi ini menyajikan series data statistik perekonomian yang secara umum dapat menggambarkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bora selama lima tahun terakhir.

Publikasi ini terbit secara berkesinambungan, sehingga data dan informasi yang terdapat di dalamnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kabupaten Bora dari waktu ke waktu khususnya dalam lima tahun terakhir.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi yang akan datang.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Blora, Agustus 2018

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bora



HERU PRASETYO

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel Pokok	vi
I PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1
1.2 Siklus Kegiatan Ekonomi	3
1.3 Pengelompokan Kegiatan Ekonomi	4
1.4 Analisa dan Kegunaan Data PDRB	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
II KONSEP DAN DEFINISI	
2.1 Domestik dan Regional	11
2.2 Produk Domestik dan Produk Regional	11
2.3 Agregat PDRB atas dasar harga berlaku	13
2.4 Agregat PDRB atas dasar harga konstan	15
III METODE PENGHITUNGAN PDRB	
3.1 Metode Pendekatan Produksi	21
3.2 Pendekatan Pendapatan	22
3.3 Pendekatan Pengeluaran	22
3.4 Metode Alokasi	23
IV ULASAN SINGKAT PERKEMBANGAN PDRB	
4.1 Kondisi Ekonomi	25
4.2 Pertumbuhan PDRB	28
4.3 Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi	34
4.4 PDRB Perkapita	42
4.5 Indeks Perkembangan	45
4.6 Indeks Berantai	46
4.7 Laju Implisit (Inflasi PDRB)	48
4.8 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha	49
V Penutup	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Metode Pendekatan Penghitungan PDRB Mnrn Lapangan Usaha	24
Tabel 4.1	PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	33
Tabel 4.2	PDRB Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2013 – 2017	34
Tabel 4.3	Distribusi PDRB adh Berlaku Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	40
Tabel 4.4	Distribusi Prosentase Kategori Dominan PDRB Kab. Blora Tahun 2016 – 2017	40
Tabel 4.5	Distribusi Prosentase Kategori Produktif PDRB Kab. Blora Tahun 2016 – 2017	41
Tabel 4.6	Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kab. Blora Tahun 2016 – 2017	42
Tabel 4.7	PDRB Perkapita adh Berlaku Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	43
Tabel 4.8	PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	43
Tabel 4.9	Perkembangan PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	45
Tabel 4.10	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017	59
Tabel 4.11	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Blora Tahun 2013 - 2017	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Siklus Ekonomi Sederhana	4
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	29
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi MnrLap Usaha di Kab. Blora Tahun 2017	31
Gambar 4.3	Distribusi PDRB adh Berlaku Kab. Blora Tahun 2017	39
Gambar 4.4	Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	44
Gambar 4.5	Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2013 – 2017	45
Gambar 4.6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	47
Gambar 4.7	Laju Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	49

## LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	69
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017	70
Tabel 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	71
Tabel 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017	72
Tabel 5	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	73
Tabel 6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017	74
Tabel 7	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	75
Tabel 8	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017	76
Tabel 9	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	77
Tabel 10	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017	78
Tabel 11	Indeks Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	79
Tabel 12	Laju Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2017	80
Tabel 13	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHB Tahun 2013 – 2017	81
Tabel 14	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHK 2010 Tahun 2013 – 2017	81
Tabel 15.	PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 – 2017	82
Tabel 16.	Distribusi Prosentase PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 – 2017	82
Tabel 17.	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 – 2017	83
Tabel 18.	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 – 2017	83
Tabel 19.	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 – 2017	84

# Bab 1

## Pendahuluan



Pertumbuhan ekonomi bisa dipacu melalui peningkatan output, baik output kegiatan yang berbasis pada eksplorasi sumber daya alam, maupun output berbagai kegiatan manufaktur dan kegiatan jasa-jasa.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Umum

Secara tradisional pertumbuhan ekonomi memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk wilayah yang lebih kecil, makna pertumbuhan ekonomi difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya muncul sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Disisi lain, pembangunan sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi, yaitu struktur ekonomi tradisional yang biasanya didominasi pertanian digantikan dengan kontribusi industri yang lebih dominan.

Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi bisa dipacu melalui peningkatan output, baik output kegiatan yang berbasis pada eksplorasi sumber daya alam, maupun output berbagai kegiatan manufaktur dan kegiatan jasa-jasa. Output-output tersebut biasanya dikelompokkan dalam dalam dua kelompok besar yaitu output barang dan output jasa. Disisi lain, output suatu wilayah bisa dipacu dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dimana produktivitas sangat berkaitan erat dengan kapasitas sumberdaya manusia, yang sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Sehingga peningkatan produktivitas akan bisa dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan yang baik, yang bisa memunculkan semangat inovasi dan daya kreasi. Melalui inovasi dan daya kreasi yang unggul, produk-produk manufaktur utamanya akan punya daya saing di pasar.

Sejalan dengan peningkatan output, pertumbuhan ekonomi juga bisa dicapai melalui kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, seperti pertanian, pertambangan penggalian, industri maupun sektor ekonomi domestik lainnya. Dimana sektor strategis adalah sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komperatif maupun keunggulan kompetitif. Sehingga ketika sektor-sektor ekonomi strategis menggeliat, diharapkan akan diikuti dengan permintaan tenaga kerja. Kondisi tersebut akan punya dorong kuat dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga akan menurunkan angka pengangguran.

---

Finalnya ketika pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh sebesar-besarnya masyarakat, akan terjadi penyerapan tenaga kerja, meningkatnya daya beli masyarakat sebagai imbas dari penurunan angka pengangguran, dan besar harapan angka kemiskinan akan berkurang sehingga kemakmuran masyarakat bisa terwujud.

Dari definisi di atas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dengan PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan juga gambaran kasar tingkat produktifitas penduduk. Selain itu bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan bahan perencanaan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2017 masih diatas rata rata pertumbuhan propinsi maupun nasional. Slaha satu pendorong pertumbuhan tersebut adalah pembangunan infrstruktur dan eksplorasi minyak dan gas bumi, utamanya gas alam yang tumbuh cukup baik. Tetapi disisi lain, transfer bagi hasil minyak dan gas bumi sebagai sumber pendapatan daerah belum menggembirakan. Sampai saat ini bagi hasil migas untuk Kabupaten Blora dinilai masih kecil. Walaupun demikian kegiatan eksplorasi gas alam tersebut akan punya *multiplier effect* yang bermanfaat dalam meggerakkan ekonomi wilayah. Dimulai dari wilayah inti, yaitu sekitar daerah eksplorasi, diharapkan akan merember sampai wilayah yang lebih luas, misalkan wilayah kecamatan maupun kabupaten.

Eksplorasi gas bumi yang diawali produksinya di akhir tahun 2015, secara tidak langsung fundamental ekonomi di Blora ikut bergeser. Peran lapangan usaha pertambangan penggalian meningkat tajam, sedang peran lapangan usaha alin cenderung menurun secara berfluktuatif. Walaupun demikian Blora masih relevan disebut sebagai daerah agraris, karena lapangan usaha pertanian juga masih cukup besar dominasinya dalam PDRB maupun dalam memutar roda ekonomi masyarakat. Pertanian sampai saat ini masih memberikan distribusi atau sumbangan yang cukup besar bagi fundamental ekonomi di Kabupaten Blora. Saat ini, seperempat dari PDRB di Kabupaten Blora disumbangkan dari lapangan usaha pertanian, sehingga ketika ada kenaikan produksi atau output pertanian, akan berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan catatan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha pertanian masih terkendali. Kenaikan biaya-biaya ini biasanya dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi.

Keunggulan lain dari kegiatan pertanian antara lain, menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Memiliki *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi lainnya, ketika output pertanian meningkat akan berdampak pada peningkatan output lapangan usaha yang bahan bakunya dari hasil pertanian seperti perdagangan dan industri yang berbasis pertanian. Efek tidak langsung lainnya antara lain, distribusi hasil pertanian sangat membutuhkan peran transportasi, sehingga output transportasi juga akan ikut terdorong untuk tumbuh. Kenaikan nilai tambah bruto, terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki sumbangan relatif besar terhadap pembentukan PDRB, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Walaupun tanpa menafikan peran kegiatan ekonomi yang sumbangannya kecil terhadap pembentukan PDRB.

Dari uraian sebelumnya bisa digarisbawahi, bahwa pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi perlu diwaspadai beberapa kecenderungan negatif, yaitu melebarnya angka ketimpangan (Gini Ratio). Pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari peningkatan angka rasio gini. Selama ini Rasio Gini di Blora ini cenderung terus naik sejalan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan atau tingkat kemakmuran masyarakat, ternyata terjadi pergeseran tingkat pemerataan pendapatan.

## **1.2. Siklus Kegiatan Ekonomi.**

Apabila diperhatikan secara seksama, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu :

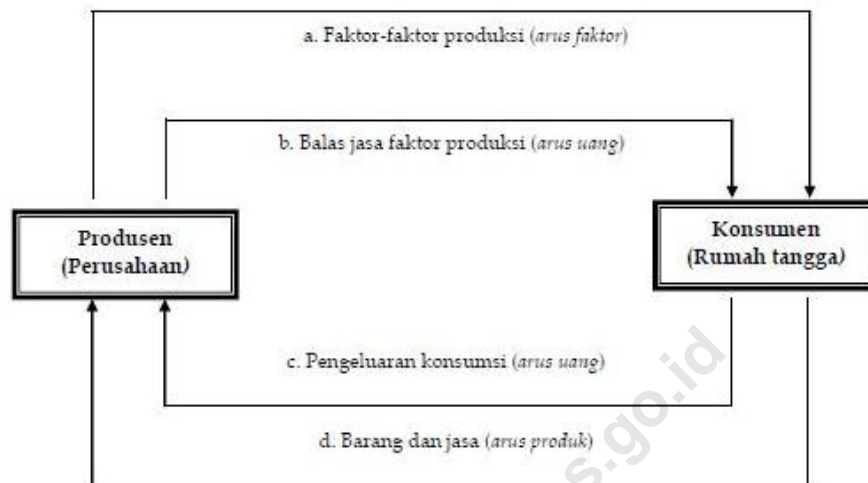
1. Kelompok produsen
2. Kelompok konsumen

Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu memakai barang dan jasa, dan satunya mengadakan barang dan jasa, sehingga berkesinambungan dan saling membutuhkan yang

akhirnya membentuk suatu siklus perekonomian. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Skema Siklus Ekonomi Sederhana**



**Kelompok konsumen memiliki :**

- a. Faktor produksi berupa (tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaan /skill) yang diberikan kepada perusahaan
- b. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi.

**Sedangkan dari pihak produsen :**

- a. Memberikan balas jasa kepada faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, berupa sewa tanah, upah/gaji, bunga dan keuntungan.
- b. Pengadaan barang dan jasa hasil produksi yang dikonsumsi oleh pihak konsumen.

**1.3. Pengelompokan Kegiatan Ekonomi**

Kegiatan perekonomian yang terjadi di daerah / wilayah adalah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan tersebut perlu dikelompokkan dalam sektor-sektor yang didasarkan atas kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara berproduksi, sifat dan jenis barang yang dihasilkan serta penggunaan barang dan jasa yang bersangkutan. Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi pengelompokan kegiatan ekonomi ini diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini kita namakan sebagai kategori.

### **1.3.1. Kelompok Kategori**

Dalam PDRB Lapangan Usaha tahun dasar 2010, pengelompokan kegiatan ekonomi/usaha dikelompokkan menjadi 17 kategori. Pengelompokan sektor tersebut didasarkan pada Sistem Neraca Nasional /*System of Nasional Account (SNA)* tahun 2008. SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktifitas ekonomi yang sesuai dengan standar baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDB/PDRB.

Dari 17 kategori tersusun dari sub-sub kategori yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kategori Pertanian, meliputi subkategori :
  - 1.1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.
  - 1.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
  - 1.3. Perikanan
2. Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :
  - 2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
  - 2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit
  - 2.3. Pertambangan Bijih Logam
  - 2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
3. Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :
  - 3.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
  - 3.2. Industri Makanan dan Minuman
  - 3.3. Pengolahan Tembakau
  - 3.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
  - 3.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
  - 3.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
  - 3.7. Industri Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
  - 3.8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
  - 3.9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
  - 3.10. Industri Barang Galian bukan Logam
  - 3.11. Industri Logam Dasar

- 
- 3.12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
  - 3.13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
  - 3.14. Industri Alat Angkutan
  - 3.15. Industri Furniture
  - 3.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
  4. Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :
    - 4.1. Ketenagalistrikan
    - 4.2. Gas
  5. Kategori Pengadaan Air
  6. Kategori Konstruksi
  7. Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :
    - 7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
    - 7.2 Perdagangan Besar dan Eceran
  8. Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :
    - 8.1 . Angkutan Rel
    - 8.2 . Angkutan Darat
    - 8.3 . Angkutan Laut.
    - 8.4 . Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
    - 8.5 . Angkutan Udara
    - 8.6 . Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
  9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:
    - 9.1. Penyediaan Akomodasi
    - 9.2. Penyediaan Makan Minum
  10. Kategori Informasi dan Komunikasi
  11. Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :
    - 11.1. Bank
    - 11.2. Asuransi dan Dana Pensiun
    - 11.3. Jasa Keuangan Lainnya
    - 11.4. Jasa Penunjang Keuangan
  12. Kategori Real Estate
  13. Kategori Jasa Perusahaan
  14. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
  15. Jasa Pendidikan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa Lainnya

### **1.3.2. Kelompok Sektor**

PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi. Pengelompokan tersebut adalah sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

#### **1. Kelompok Sektor Primer**

- Kategori Pertanian
- Kategori Pertambangan dan Penggalian

#### **2. Kelompok Sektor Sekunder**

- Kategori Industri Pengolahan
- Kategori Pengadaan Listrik, Gas
- Kategori Pengadaan Air
- Kategori Konstruksi

#### **3. Kelompok Sektor Tersier**

- Kategori Perdagangan
- Kategori Transportasi dan Pergudangan
- Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Kategori Informasi dan Komunikasi
- Kategori Jasa Keuangan
- Kategori Real Estate
- Kategori Jasa Perusahaan
- Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya

---

## **1.4. Analisa Dan Kegunaan Data PDRB**

### **1.4.1. Analisa Data PDRB :**

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah untuk ditafsirkan, sehingga analisa dapat diartikan sebagai:

1. Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (general) ataupun secara sebagian (parsial).
2. Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, analisa dapat dilakukan dengan menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro, seperti: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan perubahan indeks implisit atau tingkat inflasi PDRB dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut dapat diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal. Untuk memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisa dapat digunakan metode statistik seperti : distribusi persentase, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks implisit.

Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk menggambarkan hasil penghitungan PDRB ke dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Selain dari tujuan tersebut, analisa data PDRB juga bertujuan untuk :

1. Mempelajari pola ekonomi wilayah.
2. Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam suatu daerah dan dalam waktu yang sama.
3. Melakukan perbandingan antar komponen dan relatifnya.
4. Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di masa mendatang.

### **1.4.2. Kegunaan Data PDRB :**

Data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kebutuhan, antara lain :



## 1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik regional maupun sektoral merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) biasanya dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[ \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

G : Laju pertumbuhan

$P_t$  : PDRB Adhk tahun ke t

$P_{t-1}$  : PDRB Adhk tahun sebelum t

## 2. Tingkat Produktivitas Penduduk Suatu Daerah.

Tinggi rendahnya tingkat produktivitas penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka PDRB per kapita yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

## 3. Tingkat Perubahan Harga Agregat (Inflasi PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. PDRB ini dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan perbandingan antara harga berlaku dan harga konstan merupakan angka indeks implisit, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Indeks harga implisit dapat diperoleh/dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$I_{\text{imp.}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Adhb}}}{\text{PDRB}_{\text{Adhk}}} \times 100$$

---

Sedangkan inflasi PDRB dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[ \frac{I_{\text{imp. } t}}{I_{\text{imp. } t-1}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

$I_{\text{imp.}}$  = Indeks implisit  
 $I_{\text{imp. } t}$  = Indeks implisit tahun t  
 $I_{\text{imp. } t-1}$  = Indeks implisit tahun t-1

Inflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga di pasaran. Jika terjadi fluktuasi harga yang tinggi maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan dengan demikian maka konsumen akan merasakan pengaruhnya dimana akan terjadi ketidakseimbangan antara daya beli dengan pendapatan masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk kemudahan bagi para pembaca, sistematika publikasi PDRB disajikan dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Konsep dan Definisi
- III. Metode Penghitungan PDRB
- IV. Ulasan Singkat PDRB Kabupaten Blora
- V. Penutup
- VI. Tabel-Tabel PDRB Kabupaten Blora.

# Bab 2

## Konsep Definisi



**PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak.

## **BAB II KONSEP DAN DEFINISI**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda perlu disampaikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara umum PDRB dapat diartikan sebagai seluruh nilai produksi bruto/kotor atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor produksi yang ada di suatu wilayah tertentu dan dihitung pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

### **2.1. Domestik dan Regional**

Wilayah perekonomian yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu perhitungan nasional adalah suatu negara, sedang untuk perhitungan suatu regional adalah suatu region dari suatu negara. Pengertian *Region* disini dapat berupa Propinsi, Kabupaten/Kota atau Daerah Administrasi lain yang lebih rendah.

### **2.2. Produk Domestik dan Produk Regional**

#### **2.2.1. Produk Domestik**

Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak. Yang dimaksud wilayah Domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut (propinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan).

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi di suatu region berasal dari region lain, demikian juga sebaliknya penduduk suatu region melakukan kegiatan proses produksi di region lain. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar region ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa Upah, Gaji, Bunga, Deviden dan Keuntungan, maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dan Produk Regional.

#### **2.2.2. Produk Regional**

Adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region atau produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari

luar daerah/luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/luar negeri.

### **2.2.3. Penduduk Suatu Daerah**

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang per orang atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal secara menetap di wilayah domestik daerah tersebut.

#### **Kecuali:**

1. Wisatawan Asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan atau yang bertujuan tidak menetap.
2. Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar region yang sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut.
3. Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan.
4. Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.
5. Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja.
6. Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.

Orang-orang tersebut di atas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.

### **2.2.4. Penduduk Pertengahan Tahun**

Yang dimaksud dengan penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Juni atau didekati dari jumlah penduduk awal tahun ditambah penduduk akhir tahun dibagi dua.

Dalam menghitung Pendapatan perkapita, pembagi dari produk domestik atau produk regional adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, hal ini dilakukan sebab untuk menghindari kejadian vital (lahir, mati, datang dan pergi) yang fluktuatif tidak menentu sepanjang tahun, maka kita pakai penduduk pertengahan tahun dengan maksud agar jumlah penduduk tersebut betul-betul mencerminkan keadaan tahun tersebut. Juga karena PDRB dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

## 2.3. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

### 2.3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud **Nilai Tambah** adalah nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dihasilkan atas sebuah proses produksi yang terjadi di dalam suatu kegiatan ekonomi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi tersebut.

Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi Konsumsi Antara. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{N T B} = \text{Nilai Produksi (Output)} - \text{Konsumsi Antara}$$

- a) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain :
  1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
    - Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
    - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
    - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
    - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan
  2. Konsumsi Barang Modal Tetap (penyusutan).
  3. Pajak tidak langsung netto.
- b) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi :
  1. Produksi utama
  2. Produksi ikutan, maupun
  3. Produksi sampingan
- c) Konsumsi Antara adalah jenis biaya yang terdiri dari barang/jasa yang tidak tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.

Contoh :

- Barang baku dan penolong untuk menghasilkan output.
- Peralatan dan perlengkapan kerja karyawan.
- Pengeluaran jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi.
- Perbaikan kecil dan penggantian suku cadang yang aus.

- Iklan, riset pemasaran dan hubungan masyarakat.
- Biaya administrasi.

### **2.3.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN Adhb)**

Perbedaan antara konsep Netto ini dan konsep Bruto di atas, ialah karena konsep bruto masih ada Konsumsi Barang Modal Tetap (penyusutan) di dalamnya, sedangkan untuk nettonya Konsumsi Barang Modal Tetap harus dikeluarkan. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRN Adhb} = \text{PDRB Adhb} - \text{Konsumsi Barang Modal Tetap}$$

Sedangkan Konsumsi Barang Modal Tetap yang dimaksud disini adalah nilai atas susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

### **2.3.3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN Adbf)**

Adalah PDRN Adhb dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea ekspor/impur, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perorangan. Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unit produksi, yang akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi Pupuk, BBM, Obat dan lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut.

PDRN Adbf sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Jadi PDRN Adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa :

- Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
- Bunga modal sebagai balas jasa modal.
- Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
- Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tersebut di atas, tidak seluruhnya menjadi milik/pendapatan penduduk region tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain atas kepemilikan faktor produksi di region tersebut.

### 2.3.4. Pendapatan Regional

Pendapatan Regional Netto adalah PDRN Adbf dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar region dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari region lain (nett export). Dengan kata lain bahwa Produk Regional Netto (Pendapatan Regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di region / wilayah / daerah di mana dia berdomisili.

### 2.3.5. Pendapatan Perkapita (*Income Per Capita*)

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{a. Income Perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Regional}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Karena perhitungan pendapatan perkapita sangat sulit dilakukan, maka produktifitas wilayah biasanya didekati dengan PDRB perkapita, yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{a. PDRB Adhb Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Berlaku}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

$$\text{b. PDRB Adhk Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Konstan}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

### 2.4. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Adhk)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Adhk dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan.



Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya = 100 %, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan dihitung.

#### **2.4.1. Perubahan Tahun Dasar 2000 Menjadi 2010**

Tahun dasar merupakan perangkat penting yang secara spesifik digunakan untuk penghitungan PDRB. Tekanan tahun dasar adalah dalam penggunaan harga, yang dalam penghitungan PDRB diistilahkan PDRB atas dasar harga konstan (Adhk). PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan nilai PDRB yang hanya dipengaruhi oleh volume atau kuantum. Secara total PDRB tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara “riil” di suatu wilayah.

Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional dinyatakan bahwa estimasi PDRB/PDB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran “0” atau “5”. Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB/PDB dapat saling diperbandingkan antar negara, wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010

dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producer Price Index/PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking/* menetapkan PDB.

Perubahan tahun dasar merupakan suatu kegiatan yang cukup sulit, melelahkan, menguras waktu dan biaya. Tetapi kegiatan tersebut harus terus berjalan dan terealisasi tepat waktu, karena ada manfaat yang akan diperoleh. Dimana manfaat perubahan tahun dasar PDB/PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDB;
- Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Perubahan tahun dasar berarti merubah harga di tahun dasar. Perubahan harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tahun dasar 2010 mengadopsi dari SNA 2008, dimana terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44

diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan

Cakupan output pertanian memperlakukan *Cultivated Biological Resources* (CBR) yaitu penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi

Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai KBLI 2009 dan KBKI 2010.

#### **2.4.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan**

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum Produksi pada tahun yang berjalan yang di nilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing – masing sektor / sub sektornya.

Cara yang lazim digunakan antara lain :

- a. Revaluasi
- b. Ekstrapolasi
- c. Deflasi
- d. Deflasi berganda

### a. Revaluasi

Revaluasi diartikan menilai kembali produksi (volume) tahun berjalan dikalikan dengan harga tahun dasar, akan menghasilkan nilai produksi atas dasar harga konstan.

$$\text{NILAI PRODUKSI Adhk} = Q_n^y \times P_o$$

Dimana :

$Q_n^y$  = Jumlah kuantum komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$P_o$  = Harga komoditi y pada tahun dasar ( $t_o$ )

### b. Ekstrapolasi

Yang perlu diperhatikan dengan cara ini ialah penentuan ekstrapolatornya. Ekstrapolator yang paling baik adalah jumlah produksi dari masing-masing sektor atau subsektor. Sedangkan nilai tambah Adhk yang dihitung dengan ekstrapolasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks kuantum dibagi 100. Indeks kuantum yang dipakai adalah **Indeks Laspayers**, yaitu :

$$\text{IK LASPAYERS} = \frac{Q_n \times P_o}{Q_o \times P_o}$$

Nilai Tambah Bruto tahun berjalan ( $t_n$ ) Adhk adalah sebagai berikut :

$$\text{NTB Adhk}^y = \text{NTB}_o^y \times \frac{\text{IK}_n^y}{100}$$

Dimana :

$\text{NTB Adhk}^y$  = NTB komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$\text{NTB}_o^y$  = NTB komoditi y pada tahun dasar ( $t_o$ ).

$\text{IK}_n^y$  = Indeks kuantum Laspayers y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$Q_n$  = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$Q_o$  = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan ( $t_o$ ).

$P_o$  = Harga pada tahun dasar.

### c. Deflasi

NTB Adhk yang diperoleh dengan cara ini ialah dengan mendeflate NTB Adhb dengan indeks harga dari barang yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan **mendeflate** adalah membagi nilai tambah Adhb dengan indeks harga dari masing-masing sektor atau subsektor. Sehingga NTB Adhk tahun berjalan komoditi y adalah :

$$\text{NTB Adhk}^y = \frac{\text{NTB Adhb}_n^y}{\text{IH}_n^y} \times 100$$

Dimana :

**NTB Adhk**<sup>y</sup> = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

**NTB Adhb**<sub>n</sub><sup>y</sup> = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga berlaku komoditi y pada tahun berjalan (tn).

**IH**<sub>n</sub><sup>y</sup> = Indeks Harga komoditi y pada tahun berjalan (tn).

### d. Deflasi Berganda

Disebut ganda karena dilakukan deflasi dua kali, yaitu :

1. Membagi nilai produksi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga produksi.
2. Membagi Konsumsi Antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga Konsumsi Antara.

Selisih antara nomor 1 dan 2 di atas merupakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{NTBAdhk}_n^y = \left[ \left( \frac{Q_n^y \times P_n^y}{\text{IH}_n^y} \right) - \left( \frac{Q_n^y \times P_n^{Ay}}{\text{IH}_n^{Py}} \right) \right] \times 100$$

atau :

$$\text{NTB Adhk}_n^y = \text{NP}_k^y - \text{NBA}_k^y$$

Dimana :

**NTB Adhk**<sub>n</sub><sup>y</sup> = Nilai Tambah Bruto adh konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

**NP**<sub>k</sub><sup>y</sup> = Nilai Produksi Atas dasar harga konstan komoditi y.

**NBA**<sub>k</sub><sup>y</sup> = Nilai Konsumsi Antara Atas dasar harga konstan komoditi y.

# Bab 3

## Metode Penghitungan PDRB



PDRB dihitung menggunakan 3 macam cara pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*).
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

### BAB III METODE PENGHITUNGAN PDRB

Di dalam penghitungan PDRB Kabupaten dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang ada baik yang bersumber dari daerah sendiri maupun data dari wilayah yang lebih tinggi. Metode ini menggunakan 3 macam cara pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*).
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Sedangkan penghitungan metode tidak langsung yakni dengan metode alokasi (*Allocation Approach*). Metode penghitungan dengan cara alokasi dilakukan dengan mengalokasikan PDRB Propinsi untuk Kabupaten/Kota atau PDRB Kabupaten untuk Kecamatan dengan menggunakan variabel yang cocok sebagai alokatornya, seperti data produksi, jumlah penduduk, luas lahan, mata pencaharian ataupun data lainnya yang dianggap relevan.

#### 3.1. Metode Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi atau PDRB menurut lapangan usaha, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi **Konsumsi Antara** dari masing-masing **nilai produksi bruto** tiap-tiap kategori atau sub kategori.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen, yaitu belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Penggunaan harga produsen ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan biaya transport akan dihitung sebagai nilai tambah pada kategori transportasi dan keuntungan pemasaran akan dihitung pada kategori perdagangan. Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto, sebab masih terdapat biaya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibeli dari kategori lain.

Nilai tambah bruto adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen-komponen diantaranya :

1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
  - Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
  - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
  - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
  - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan.
2. Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan).
3. Pajak tidak langsung netto.

Formulasi Nilai Tambah Bruto dengan pendekatan produksi adalah :

$$\text{Nilai Tambah Bruto (NTB)} = \text{Nilai produksi bruto} - \text{Konsumsi Antara}$$

Pendekatan ini banyak digunakan pada produksi yang berbentuk barang, seperti sektor pertanian, pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari NTB maka akan diperoleh Nilai Tambah Netto.

### 3.2. Pendekatan Pendapatan

Untuk pendekatan dari segi Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu :

- Upah dan gaji.
- Surplus usaha.
- Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan).
- Pajak tak langsung netto.

Untuk usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Dari hasil penjumlahan seluruh balas jasa faktor produksi tersebut akan diperoleh **Nilai Tambah Netto atas biaya faktor produksi**. Sedangkan untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar harus ditambah dengan nilai **Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan) dan pajak tak langsung netto**. Metode ini banyak dipakai pada sektor pemerintahan, bank/lembaga keuangan dan kategori jasa-jasa.

### 3.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang berbentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
2. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode anggaran rumah tangga, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar daerah/luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti :

- Konsumsi rumah tangga
- Konsumsi pemerintahan



- Konsumsi lembaga swasta non profit
- Perubahan inventory
- Pembentukan modal tetap bruto
- Perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Dengan menghitung komponen-komponen ini kemudian menjumlahkannya akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku/pasar.

### **3.4. Metode Alokasi**

Yang dimaksud dengan metode Alokasi PDRB adalah menghitung PDRB tingkat propinsi atau tingkat kabupaten dengan cara mengalokir angka PDRB dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat di bawahnya, dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas :

1. Nilai produksi bruto dan netto.
2. Jumlah produksi/output.
3. Jumlah tenaga kerja.
4. Penduduk.
5. Alokator lain yang dianggap cocok untuk masing-masing daerah.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah yang mendapat alokasi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Metode alokasi dipakai jika dari ketiga metode sebelumnya sudah tidak mungkin lagi diterapkan. Suatu contoh bila suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berlokasi di daerah lain, sedangkan kantor cabang ini tidak dapat mengetahui nilai tambah yang diperolehnya, oleh karena perhitungan neraca rugi/laba dilakukan oleh kantor pusat. Untuk mengatasi hal semacam itu, penghitungan nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan alokasi menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan suatu cabang terhadap kantor pusat.

Dari keempat metode di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengeluaran/permintaan akhir akan sama dengan produk akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Demikian juga nilai tambah produk barang dan jasa akan sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat. Selanjutnya produk domestik regional bruto seperti yang dimaksudkan di atas disebut Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar.

**Tabel 3.1 Metode Pendekatan  
Penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha**

No	Kategori/Subkategori	Metode yang Digunakan
1	2	3
1	Kategori Pertanian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
2	Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
5	Kategori Pengadaan Air	Pendekatan Produksi
6	Kategori Konstruksi	Pendekatan Pendapatan
7	Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
8	Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
9	Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:	Pendekatan Produksi
10	Kategori Informasi dan Komunikasi	Pendekatan Produksi
11	Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Pendapatan
12	Kategori Real Estate	Pendekatan Produksi
13	Kategori Jasa Perusahaan	Pendekatan Pendapatan
14	Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pendekatan Pendapatan
15	Jasa Pendidikan	Pendekatan Produksi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pendekatan Produksi
17	Jasa Lainnya	Pendekatan Produksi

# Bab 4

## Ulasan Singkat



Ekonomi blora di tahun 2017 ini tumbuh sebesar 5,84 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi jawa tengah yang tumbuh sebesar 5,27 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,07 persen

## **BAB IV ULASAN SINGKAT**

### **4.1 Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Blora yang cukup fenomenal di tahun 2016 tidak lagi terjadi di tahun 2017, dan kemungkinan juga akan sangat sulit terulang di tahun-tahun mendatang. Tetapi walaupun begitu pertumbuhan di tahun 2017 khususnya, dinilai masih cukup baik. Ekonomi blora di tahun 2017 ini tumbuh sebesar 5,84 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi jawa tengah yang tumbuh sebesar 5,27 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Blora di tahun 2017 masih didominasi oleh pertumbuhan sektor primer, yaitu lapangan usaha pertanian dengan nilai tambah sebesar 5,08 triliun dan lapangan usaha pertambangan penggalian dengan nilai tambah sebesar 5,26 triliun. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora juga akibat dorongan semua kegiatan ekonomi yang ada.

Sejalan dengan roadmap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, di tahun 2017 ini pembangunan infrastruktur juga cukup masif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung baru, renovasi maupun penambahan lokal gedung milik pemerintah. Perbaikan sarana prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan, pembangunan sarana ekonomi seperti pembangunan pasar, juga pembangunan infrastruktur pertanian seperti embung dan pembangunan sarana kesehatan seperti perluasan ruang rawat inap pada beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora seperti perbaikan fasilitas puskesmas Ketuwon Kedungtuban dan Puskesmas Dopleng.

Sumber pembiayaan infrastruktur disamping dilakukan oleh pemerintah daerah, beberapa proyek infrastruktur juga dibiayai oleh pemerintah pusat seperti peningkatan mutu jalan Blora Cepu yang berubah status menjadi jalan nasional. Pada tahun 2017 ini dilakukan pelebaran jalan Blora-Cepu nampaknya proyek pelebaran jalan akan berlanjut di tahun 2018 mendatang dengan menyentuh ruas lainnya. Berubahnya status jalan Rembang-Blora-Cepu dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, nampaknya membawa banyak dampak positif bagi perekonomian daerah.

Ketika terjadi pembangunan infrastruktur, maka disitulah akan muncul nilai tambah pada lapangan usaha konstruksi. Dan biasanya akan membawa dampak positif baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada kategori lainnya. Pembangunan jalan dan jembatan akan berdampak positif pada lancarnya hubungan atau transportasi antar wilayah sehingga akan meningkatkan nilai tambah di lapangan usaha transportasi dan perdagangan antar wilayah.

Demikian juga dengan pembangunan embung atau infrastruktur pertanian lainnya, disamping meningkatkan nilai tambah di lapangan usaha konstruksi juga punya pengaruh positif terhadap nilai tambah di lapangan usaha pertanian. Dan lebih jauh lagi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perdagangan hasil-hasil pertanian..

Lebih lanjut di tahun 2017, kategori atau lapangan usaha Pertambangan Penggalan *share* terhadap PDRB Kabupaten Blora mengungguli *share* dari lapangan usaha Pertanian. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan nilai tambah yang cukup tinggi dari kategori Pertambangan dan Penggalan yang melebihi kategori Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Tetapi walaupun memiliki *share* yang besar dan pertumbuhan yang tinggi, namun dampak positif secara langsung belum begitu dirasakan khususnya oleh masyarakat Blora. Sebaliknya ekonomi Kabupaten Blora walaupun secara *share* PDRB berada pada level dua, tetapi sampai saat ini masih terasa didominasinya, yaitu lapangan usaha Pertanian. Peran pertanian dirasa masih cukup penting sebagai pendorong perekonomian di Kabupaten Blora. Kenaikan atau penurunan nilai tambah ataupun output kegiatan tersebut akan berdampak secara signifikan pada ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora. Oleh karena itu pemerintah sangat peduli dan terus memperbaiki tata kelola khususnya dibidang pertanian. Dalam dua tahun berturut-turut output pertanian yang menjadi fokus utama pemerintah yaitu komoditas padi dan palawija memberikan hasil cukup baik.

Pertumbuhan nilai tambah kategori Pertanian bisa dikatakan merupakan pertumbuhan yang baik, yaitu pertumbuhan yang memiliki *trickle down effect* yang cukup besar. Hampir separoh angkatan kerja di Blora bekerja di lapangan usaha pertanian, sehingga bisa diasumsikan kenaikan output pertanian akan berimbang terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan output pertanian juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat petani, tentunya dengan catatan inflasi barang dan jasa pertanian masih dalam taraf yang wajar. Tetapi sampai saat ini Lapangan usaha pertanian masih dikenal sebagai lapangan usaha dengan output per tenaga kerja yang rendah. Pendapatan yang diterima petani secara rata-rata bisa dikatakan kecil. Sehingga petani identik dengan masyarakat kurang mampu. Disamping itu ada banyak kelemahan dari lapangan usaha pertanian ini, lahan yang cenderung terus berkurang karena alih fungsi lahan, distribusi pupuk dan obat-obatan yang belum baik,

harga pupuk dan obat-obatan yang dirasa masih tinggi, ketersediaan air serta faktor alam lainnya seperti cuaca dan curah hujan yang kadang tidak menentu disamping serangan hama dan penyakit yang terus menghantui petani di setiap musim tanam. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus dihadapi pada kegiatan ini.

Untuk mendukung sektor pertanian, pada tahun 2017 dilaksanakan pembangunan empat buah embung besar senilai total puluhan miliar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Berdasarkan data yang diterima dari BBWS, pembangunan 4 embung ini total anggarannya sebesar 23,4 miliar. Wilayah Blora yang selalu kesulitan air di saat musim kemarau, kedepan secara bertahap akan berkurang dengan adanya pembangunan embung tersebut. Keempat embung itu adalah Embung Plered di Desa Purworejo dan Embung Purwosari di Desa Purwosari, Kecamatan Blora, lantas Embung Jiken di Desa Jiken, Kecamatan Jiken serta Embung Kemiri di Desa Kemiri Kecamatan Jepon.

Ketergantungan yang tinggi pada produk primer, seperti produk primer dari pertanian maupun pertambangan penggalian harus sedikit demi sedikit mulai dikurangi, yaitu melalui pengembangan sumber-sumber ekonomi baru seperti kegiatan *manufacture*. Masih banyak kegiatan ekonomi yang bisa digarap dengan pertimbangan melimpahnya bahan baku. Dalam sejarahnya industri pengolahan merupakan kegiatan yang bisa mendorong ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat, bisa menyerap tenaga kerja banyak, dan bisa memberi *multiplier effect* pada kegiatan ekonomi lain. Pengembangan industri pengolahan bisa menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi lokal. Ke depan pengembangan industri berbasis sektor pertanian bisa dijadikan alat untuk memacu ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah daerah khususnya untuk bisa mendorong hal itu bisa terwujud.

Untuk bisa mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru diperlukan analisis potensi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai kategori maupun subkategori ekonomi di wilayah tersebut. Kategori ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong kategori-kategori ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa kategori unggulan adalah kategori yang memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk kategori sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar.

## 4.2 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan selama periode tertentu, biasanya periode yang digunakan adalah periode tahunan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun menurut harga konstan.

Penyajian angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga (adh) berlaku maupun adh konstan dibuat secara series (lima tahun), sehingga akan mampu memberikan gambaran kinerja ekonomi secara makro dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya angka-angka tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan oleh pengguna data sebagai bahan monitoring, evaluasi, kajian maupun perencanaan, sehingga didapat keputusan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Pada tahun 2017, besaran PDRB Kabupaten Blora menurut harga berlaku tercatat sebesar 21,80 Triliun rupiah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 19,99 triliun rupiah atau terjadi pertumbuhan sebesar 9,02 persen. Semua kategori mengalami pertumbuhan positif, dimana kategori pertambangan Penggalian merupakan kategori dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku merupakan pertumbuhan semu, karena belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, karena masih terpengaruh adanya faktor harga, atau didalamnya masih mengandung angka inflasi maupun deflasi.

Atas dasar harga berlaku, seperti disampaikan sebelumnya, lapangan usaha atau kategori Pertambangan Penggalian memiliki pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 12,82 persen, kemudian disusul oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,53 persen, disusul lapangan usaha Konstruksi dan Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 11,59 persen dan 11,39 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha atau kategori Pertanian yang

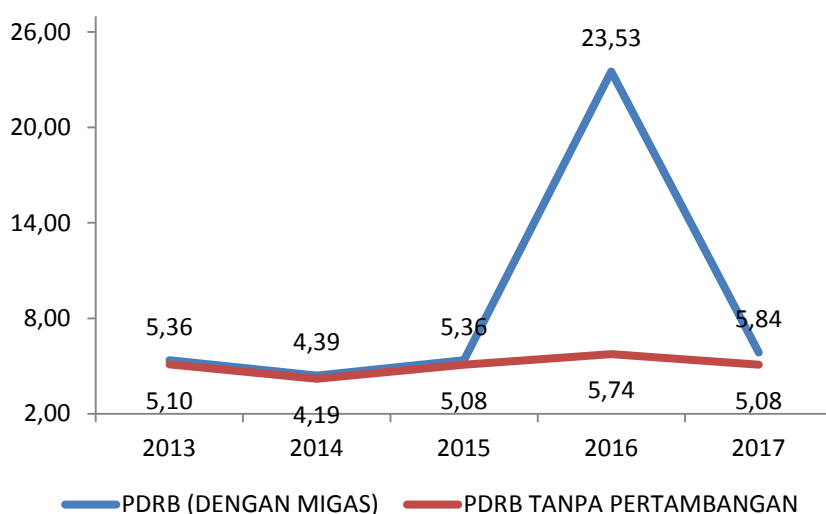
tumbuh sebesar 3,79 persen. Pertumbuhan adh berlaku terjadi karena adanya kenaikan output maupun kenaikan harga-harga atas barang dan jasa.

Sedangkan menurut harga konstan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil. Dikatakan riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi/deflasi. Pertumbuhan PDRB mnrt harga konstan inilah yang biasa kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Blora tercatat sebesar 5,84 persen, dari 15,91 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 16,84 triliun rupiah pada tahun 2017. Pertumbuhan tersebut dinilai cukup baik. Tinggal bagaimana mengevaluasi pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Blora di tahun 2017 ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi jawa tengah maupun nasional.

Dilihat dari gambar 4.1 di bawah ini, terlihat bahwa lapangan usaha pertambangan penggalian utamanya kegiatan pertambangan minyak dan gas alam, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora pada tahun yang bersangkutan. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan memasukkan angka dari kategori Pertambangan dan Penggalian.

Ditahun 2017, selisih perumbuhan ekonomi dengan dan tanpa migas sekitar angka 0,76 persen. Malahan di tahun 2016, ketika eksploitasi blok gas Gundih optimal, selisih pertumbuhan migas dan tanpa migas mencapai 17,79 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi minyak dan gas alam cukup punya dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora.

**Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017**





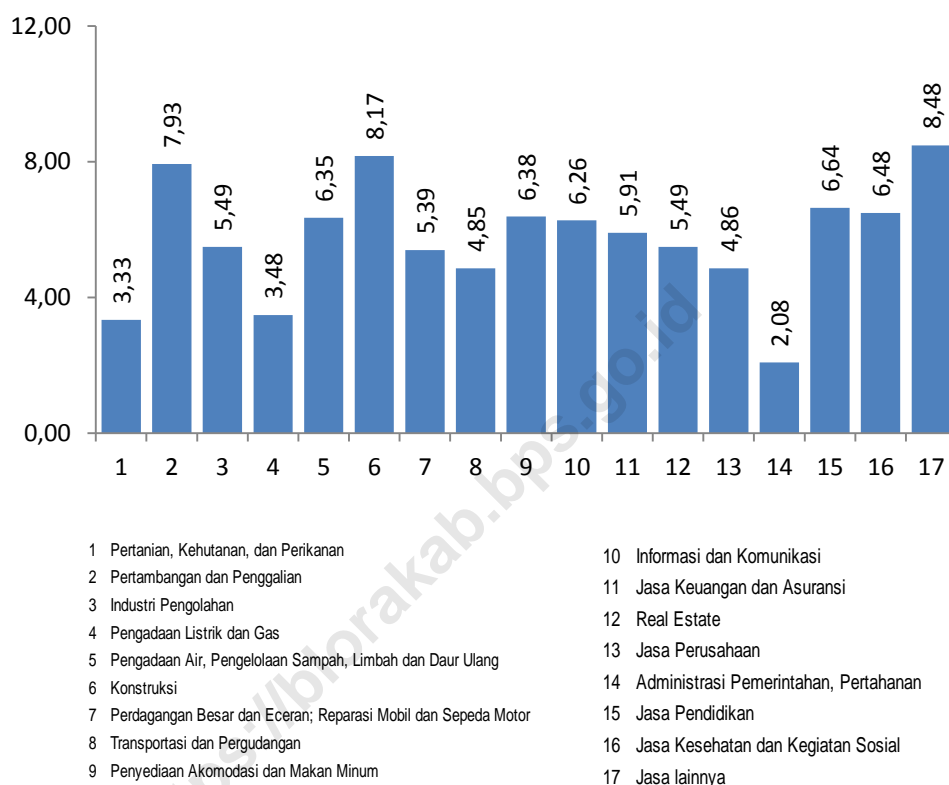
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada keterkaitan antara pertumbuhan suatu lapangan usaha terhadap lapangan usaha lainnya. Ketika terjadi pembangunan infrastruktur, maka NTB konstruksi akan terbentuk, yang kemudian mendorong nilai tambah lapangan usaha lainnya untuk tumbuh seperti Angkutan, Perdagangan bahkan Pertanian. Demikian juga ketika lapangan usaha pertanian tumbuh, akan mendorong lapangan usaha lainnya untuk tumbuh, seperti lapangan usaha perdagangan, transportasi bahkan jasa-jasa. Kondisi ini terjadi karena hasil-hasil pertanian akan secara aktif diperdagangkan baik di wilayah sendiri maupun dijadikan sebagai komoditas ekspor. Ketika distribusi hasil pertanian diperdagangkan, tak lepas peran transportasi untuk mendistribusikan hasil pertanian itu dari daerah penghasil ke daerah pemasaran. Sedangkan disela-sela kegiatan tadi kegiatan-kegiatan jasa-jasa akan tercipta di sana.

Contoh lainnya adalah lapangan usaha jasa keuangan. Share terhadap PDRB cukup kecil, hanya seekitar 3,04 persen di tahun 2017. Namun karena merupakan penyedia modal usaha, maka hampir semua kegiatan ekonomi membutuhkan peran jasa keuangan. Dan sebaliknya, perkembangan kategori jasa keuangan juga bisa disebabkan karena kategori lain yang berkembang/tumbuh. Disamping karena kegiatan ekonomi, jasa keuangan ini juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, serta pola konsumsi masyarakat. Saat ini yang namanya lembaga-lembaga pembiayaan tumbuh cukup pesat. Kondisi ini adalah merupakan salah satu imbas dari pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan modern.

Nilai tambah bruto (NTB) kegiatan pertambangan dan penggalian pada tahun 2017 masih tumbuh tinggi. Sayangnya nilai tambah yang besar tersebut belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat Blora. Kondisi ini terjadi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku yakni, UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Minyak Bumi dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil (DBH) Minyak Bumi yang untuk daerah sebesar 15,5% dibagi dengan rincian 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi

yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Karena inilah hasil tambang yang bisa dinikmati utamanya oleh masyarakat Blora masih sangat kecil.

**Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2017**



Secara makro, ekonomi Blora ditopang oleh empat kegiatan ekonomi utama, dilihat dari *share* nilai tambah masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB. Yang pertama adalah lapangan usaha Pertambangan Penggalian dengan *share* terhadap PDRB sebesar 24,12 persen. Yang kedua lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* terhadap PDRB sebesar 23,33 persen. Yang ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan *share* terhadap PDRB sebesar 15,16 persen dan keempat adalah lapangan usaha Industri Pengolahan dengan *share* terhadap PDRB sebesar 9,80 persen. Ketika lapangan usaha yang dominan tersebut tumbuh tinggi, akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Blora, dan sebaliknya ketika lapangan usaha yang dominan tersebut tumbuh melambat tentunya bisa diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Blora juga ikut melambat.

Di tahun 2017, pertumbuhan nilai tambah bruto lapangan usaha Pertambangan Penggalian masih cukup tinggi, yaitu sebesar 7,93 persen, dan menjadikan lapangan usaha ini memberikan andil terhadap PDRB Kabupaten Blora tertinggi menggeser lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini menyumbang sebesar 2,20 persen dari pertumbuhan ekonomi Blora. *Share* dan pertumbuhannya tinggi, tetapi belum mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal .

Di tahun yang sama lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 3,33 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,95 persen. Karena porsi lapangan usaha ini hampir sepertiga PDRB sehingga ketika lapangan usaha ini tumbuh cukup baik, maka daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi Blora di tahun tersebut cukup baik. Lapangan usaha ini menyumbang sebesar 0,71 persen dari total pertumbuhan yang ada.

Lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor pada tahun 2017 juga tumbuh cukup menggembirakan. Tercatat sebesar 5,39 persen. Pengaruh pertumbuhan lapangan usaha Pertanian cukup besar terhadap kategori ini, disamping lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertambangan Penggalian, terutama kegiatan penggalian golongan C. Terhadap pertumbuhan total, kategori ini memberikan andil sebesar 0,85 persen.

Ditahun yang sama lapangan industri pengolahan tumbuh sebesar 5,49 persen. Dan hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora sebesar 0,47 persen. Beberapa kegiatan ekonomi yang cukup mendorong terhadap pertumbuhan nilai tambah bruto di kategori Industri Pengolahan antara lain kegiatan industri makanan dan minuman, industri barang dari kayu dan industri pakaian, termasuk disini adalah kerajinan batik yang cukup berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula ragam kebutuhan masyarakat. Gaya hidup berubah seiring dengan perkembangan jaman. Secara signifikan permintaan akan barang dan jasa juga ikut meningkat. Semua itu tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat ditandai dengan lahirnya bermacam smartphone telah mendorong permintaan masyarakat akan jasa telekomunikasi tersebut. Masyarakat saat ini tidak bisa lepas apa yang disebut sebagai *gadget*, yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi ataupun untuk berinteraksi melalui social media. Pada tahun 2017 ini lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,26 persen. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi tidak bisa dipungkiri telah banyak merubah gaya hidup masyarakat saat ini, tetapi disisi lain teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kegiatan lainnya.

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2016 yakni sebesar 23,53 persen dan yang terendah sebesar 4,39 persen pada tahun 2014.

**Tabel : 4.1 PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	13.543.661,54	10,24	11.712.504,85	5,36
2013	15.101.975,26	11,51	12.227.201,29	4,39
2014	16.368.347,06	8,39	12.882.587,70	5,36
2016	19.993.674,30	22,15	15.913.432,03	23,53
2017	21.797.101,52	9,02	16.843.360,54	5,84

Selanjutnya apabila kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dikeluarkan, akan diperoleh angka PDRB tanpa migas. Karena dominasi kategori ini cukup besar, maka pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan pertumbuhan PDRB (dengan migas) lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB tanpa migas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pertambangan minyak dan gas bumi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Apalagi dengan adanya lifting gas yang mulai optimal di tahun 2016. Semoga ke depan dengan adanya kegiatan ekonomi pertambangan, punya efek positif dalam mendorong ekonomi Blora untuk tumbuh lebih baik tidak hanya pada tataran angka-angka tetapi juga secara riil dirasakan oleh masyarakat Blora secara umum.

Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Blora berjalan pada rel yang benar, lapangan kerja diharapkan semakin terbuka, barang dan jasa juga mudah didapat di pasaran seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan terbukanya lapangan kerja pendapatan masyarakat diharapkan juga semakin meningkat. Harapan kedepan, potensi-potensi penggerak pertumbuhan akan semakin dikembangkan melalui perbaikan infrastruktur disatu sisi dan peningkatan sumber daya masyarakat disisi yang lain. Pembukaan daerah-daerah terisolir di harapkan juga kana mampu mendorong

ekonomi semakin berkembang. Namun perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan dinikmati secara merata oleh masyarakat. Faktor pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan baik pemerataan antar wilayah maupun antar individu sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan.

**Tabel : 4.2 PDRB Kabupaten Blora Tanpa Minyak Tahun 2013 – 2017**

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	11.756.251,71	10,49	10.093.016,31	5,10
2013	13.023.829,11	10,78	10.516.216,81	4,19
2014	14.343.891,36	10,14	11.050.744,30	5,08
2016	15.644.512,03	9,07	11.685.075,51	5,74
2017	16.881.311,05	7,91	12.278.655,67	5,08

### 4.3 Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Sumbangan / *share* Nilai Tambah Bruto lapangan usaha terhadap total Nilai Tambah Bruto atau PDRB, biasa kita sebut sebagai Distribusi PDRB. Distribusi PDRB menggambarkan struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi distribusinya, berarti semakin besar peranan kategori/sub kategori tersebut sebagai penyumbang ekonomi wilayah dan sebaliknya. Seiring perjalanan waktu, akibat perubahan faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional maupun internasional, akan sangat berpengaruh terhadap perubahan tiap kategori ekonomi. Akibatnya, output tiap kategori akan berbeda satu dengan yang lainnya, akibatnya distribusi kategori ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran atau perubahan. Untuk melihat besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB digunakan PDRB adh berlaku.

Sebelum tahun 2016, kategori pertanian dan kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori andalan bagi perekonomian Kabupaten Blora, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Tapi mulai tahun 2016, lapangan

usaha Pertambangan Penggalian *sharenya* meningkat tajam, dari 14,05 persen di tahun 2015 menjadi 23,19 persen di tahun 2016. Menggeser *share* kategori Perdagangan Besar Eceran. Dan di tahun 2017, *share* lapangan usaha Pertambangan Penggalian tercatat sebesar 24,12 persen. Itu berarti lapangan usaha ini memiliki *share* terbesar. Sehingga di tahun 2017 urutan terbesar *share* terhadap PDRB adalah lapangan usaha Pertambangan Penggalian, diurutkan berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Perbaikan Mobil dan Sepeda Motor dan berikutnya lagi lapangan usaha Industri Pengolahan.

Pada tahun 2017 sumbangan kategori pertanian tercatat sebesar 23,33 persen, *sharenya* turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 24,51 persen. Dalam lima tahun terakhir distribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung turun, kecuali di tahun 2014. Kondisi ini menggambarkan kalo kategori pertanian sepertinya sudah dipuncak pelana, artinya kecenderungan untuk meningkatkan output cukup sulit, tetapi sebaliknya kecenderungan produksinya untuk turun cukup besar. Kecenderungan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang kian lama kian menyusut, walaupun teknologi pertanian dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan terus berkembang.

Besar kecil atau naik turunnya sumbangan atau distribusi suatu lapangan usaha terhadap total PDRB, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha tersebut dan lapangan usaha lainnya pada tahun yang bersangkutan. Dari sembilan kategori, kategori pertanian pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Akibatnya ada kecenderungan *share* kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB juga cenderung untuk turun. Dan fenomena dilapangan menunjukkan ada sedikit pergeseran struktur dari daerah agraris menuju daerah non agraris, walaupun kalau dilihat pergeserannya relatif sangat lambat. Tetapi meskipun kategori pertanian distribusinya cenderung menurun, kategori ini masih cukup dominan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Blora.

Pada tahun 2017, nilai tambah bruto lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menempati urutan pertama menggeser lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB. Nilai tambah bruto kegiatan Pertambangan Penggalian tidak hanya output dari usaha pertambangan dan penggalian, tetapi termasuk juga kajian (topografi, geologi, geofisika dan geokimia), pengeboran/eksplorasi, pengambilan contoh, dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini

memberikan andil terhadap PDRB sebesar 24,12 persen, sedikit lebih tinggi dari kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Meskipun punya *share* cukup besar terhadap PDRB, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja relatif kecil (dibandingkan kategori pertanian ataupun kategori perdagangan). Akibatnya perannya dalam mendorong roda ekonomi di Kabupaten Blora belum begitu tampak. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena output murni yang dihasilkan kegiatan tersebut dibawa keluar dan sebagian besar output tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat lokal atau masyarakat di Kabupaten Blora secara umum.

Kontribusi terbesar ketiga dipegang oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Distribusi kategori ini tercatat sebesar 15,16 persen di tahun 2017, naik tipis dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 15,15 persen. Perkembangan kategori perdagangan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertama pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semakin banyak pula permintaan akan barang barang dan jasa. Kedua, meningkatnya daya beli masyarakat. Ketiga, adanya surplus produksi dari sektor primer, seperti kategori Pertanian dan kategori Pertambangan Penggalian serta output dari kategori Industri Pengolahan. Keempat adalah kemudahan transportasi barang dan jasa yang mempermudah distribusi barang dan jasa antar wilayah, dan kelima adalah peningkatan penjualan kendaraan bermotor seraj jasa reparasinya. Selain dari uraian diatas, masih banyak kegiatan yang berperan dalam perkembangan kategori G, yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kategori yang cukup dominan berikutnya adalah kategori C atau lapangan usaha Industri Pengolahan. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2017 sebesar 9,80 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,67 persen. Pertumbuhan nilai tambah bruto adh berlaku yang lambat, berkontribusi terhadap penurunan share kategori Industri Pengolahan terhadap total PDRB. Dilihat dari sumbangannya yang belum begitu dominan dalam mendorong roda perekonomian di Kabupaten Blora, perlu usaha ekstra agar lapangan usaha tersebut bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang banyak terdapat di Blora.

Setelah diuraikan kontribusi dari beberapa lapangan usaha yang dominan, selanjutnya akan diuraikan lapangan usaha penyusun PDRB Kabupaten Blora lainnya. Kecilnya *share* suatu kategori terhadap PDRB itu bukan berarti lapangan usaha tersebut tidak penting. Kecilnya *share* karena nilai tambah kategori tersebut lebih kecil dibanding lainnya. Nilai tambah yang kecil terjadi bisa karena jumlah usaha yang sedikit di wilayah tersebut atau konsumsi antaranya yang besar. Tetapi peran/*share* suatu kategori di suatu wilayah seolah-

olah terjadi dengan sendirinya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di wilayah tersebut, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Kategori D atau lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas serta kategori E yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Di tahun 2017, masing-masing memberikan distribusi kepada PDRB Kabupaten Blora sebesar 0,06 persen dan 0,04 persen. Sumbangan terhadap PDRB sangat kecil tetapi perannya cukup besar bagi masyarakat maupun dalam kegiatan ekonomi lainnya. Kebutuhan masyarakat akan listrik dan air merupakan keniscayaan, disamping itu hampir semua lapangan usaha membutuhkan pasokan listrik maupun air.

Pada tahun 2017 pertumbuhan kategori F atau lapangan usaha Konstruksi tercatat sebesar 8,17 persen adh konstan, tetapi ternyata belum mampu menambah *share* kategori ini terhadap PDRB kabupaten. *Share* kategori Konstruksi terhadap total PDRB Kabupaten pada tahun 2017 tercatat sebesar 4,08 persen naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,98 persen. Peran kategori ini dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami pergeseran yang berarti, dan dalam beberapa tahun ke depan kategori bangunan ini kemungkinan masih disekitar angka tersebut. Kegiatan konstruksi terbanyak dilakukan oleh swasta dan sisanya merupakan belanja modal pemerintah terutama dalam pembenahan infrastruktur baik jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya. Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk secara tidak langsung ikut menyumbang di kategori konstruksi akibat kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal maupun tempat usaha.

Kategori H atau lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, pada tahun 2017 distribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB tercatat sebesar 2,61 persen naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,56. Di Kabupaten Blora, kegiatan transportasi masih didominasi oleh kegiatan angkutan barang. Salah satunya angkutan barang galian, yaitu pasir, dari Blora ke luar wilayah seperti Rembang dan Pati. Kabupaten Blora juga dilalui oleh jaringan kereta api, yang melewati Kecamatan Jati, Randublatung, Kedungtuban dan Cepu. Sampai saat ini angkutan kereta api tersebut sangat diandalkan oleh masyarakat Blora sebagai moda transportasi darat untuk ke luar Blora. Walaupun cukup rame tetapi sumbangan/*share* sub kategori angkutan rel terhadap PDRB masih sangat kecil. Walaupun *sharenya* kecil, peran angkutan rel dalam mendorong roda ekonomi di Kabupaten Blora tidak bisa diabaikan.

Kategori I atau lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2017 memberi andil terhadap PDRB sebesar 3,24 persen. Lapangan usaha ini didominasi oleh kegiatan penyediaan makan minum, yang berupa restoran, rumah makan kedai maupun



penyediaan makanan keliling yang hampir merata di semua kecamatan. Untuk jasa akomodasi banyak terpusat di Kecamatan Blora dan Cepu yang terdiri atas hotel berbintang dan non bintang.

Kategori J atau lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan andil sebesar 0,97 persen di tahun 2017, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,96 persen. Walaupun *share* nya kecil lapangan usaha ini cukup vital dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Peran teknologi informasi dalam mendorong kemajuan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Teknologi ini menafikan jarak dan waktu. Kegiatan ekonomi, pertukaran barang dan jasa akan semakin ekonomis. Kemajuan teknologi informasi dan perubahan budaya masyarakat yang semakin modern tidak bisa dipisahkan. Dalam beberapa tahun ke depan lapangan usaha ini diperkirakan akan terus berkembang dengan pertumbuhan nilai tambah yang tinggi, tetapi *share* yang diberikan masih relatif kecil.

Kategori K atau lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,04 persen naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,00 persen. Kategori jasa keuangan mencakup kegiatan perbankan, badan perkreditan rakyat, koperasi, asuransi dan jasa keuangan lainnya seperti *leasing*, dana pensiun dan penukaran uang (*money changer*). *Share*nya tidak begitu besar, tetapi perannya sangat vital terutama dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Kategori L atau lapangan usaha Real Estate memberi kontribusi sebesar 1,22 persen di tahun 2017, turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,23 persen. Kategori ini mencakup kegiatan sewa beli rumah tinggal, real estate, dan persewaan tempat usaha. Termasuk juga di dalamnya adalah, apa yang disebut sebagai *Ownership Occupy Dwelling* (OOD), yaitu perkiraan sewa rumah yang dimiliki oleh masyarakat.

Kategori M,N atau jasa perusahaan pada tahun 2017 memberi *share* terhadap PDRB sebesar 0,28 persen. Walaupun sumbangan terhadap PDRB persentasenya kecil, lapangan usaha jasa perusahaan sedikit banyak memberikan andil dalam kegiatan usaha ekonomi lainnya. Yang tercakup dalam kategori ini sangat banyak, seperti jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli, teknis dan jasa bisnis dan jasa persewaan.

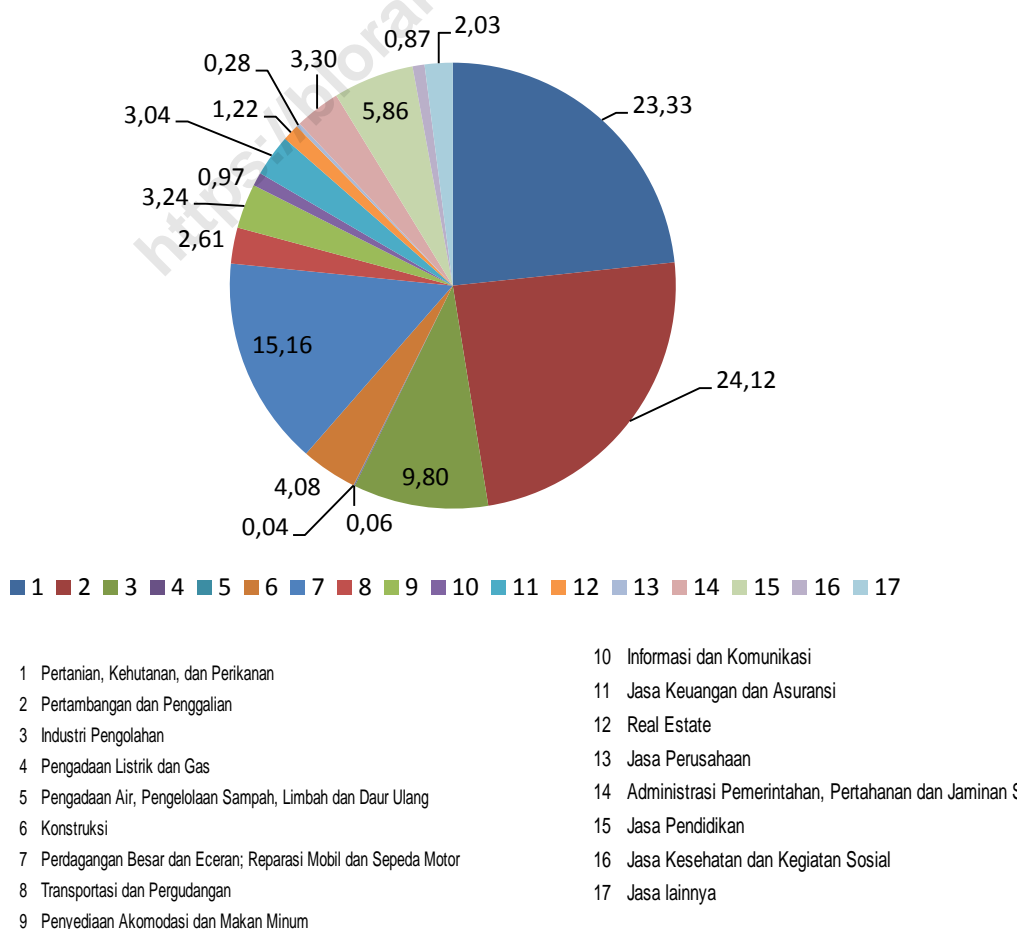
Kategori O atau lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Pada tahun 2017 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,30 persen. Kategori P atau lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki kontribusi yang tertinggi pada kegiatan jasa-jasa. Pada tahun 2017, lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap total PDRB

Kabupaten sebesar 5,86 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,76 persen. Kategori ini merupakan kategori ranking ke 5 dari 17 kategori PDRB.

Selanjutnya kategori Q atau lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2017 mempunyai distribusi sebesar 0,87 persen di tahun 2017, dan kategori R,S,T,U atau lapangan usaha Jasa Lainnya memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 2,03 persen.

Dari tujuh belas kategori kegiatan ekonomi di Kabupaten Blora terdapat empat kategori yang cukup dominan yaitu, kategori A, B, C dan G, yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Jumlah andil dari keempat kategori dominan tersebut terhadap total PDRB kabupaten tercatat sebesar 72,41 persen pada tahun 2017.

**Gambar 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2017 (%)**



Dari tabel 4.3 dibawah terlihat bahwa lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan kontribusinya cenderung turun, kecuali di tahun 2016, sedangkan lapangan usaha lainnya cenderung fluktuatif.

**Tabel 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**

KATEGORI	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,93	27,84	28,28	24,51	23,33
B	Pertambangan dan Penggalian	13,80	14,67	14,06	23,31	24,12
C	Industri Pengolahan	10,27	11,28	10,83	9,67	9,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur U	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,11	4,26	4,40	3,98	4,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Rep Mbl dan Spd Mtr	16,88	16,42	16,47	15,15	15,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,75	2,86	2,56	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,41	3,52	3,21	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	1,13	1,10	1,09	0,96	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,19	3,30	3,00	3,04
L	Real Estate	1,32	1,37	1,40	1,23	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,31	0,28	0,28
O	Adm Pemerintahan, Pertah dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,76	3,83	3,42	3,30
P	Jasa Pendidikan	6,18	6,43	6,37	5,76	5,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,95	0,99	0,87	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	2,15	2,17	2,00	2,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4.4 Distribusi Prosentase Kategori Dominan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2017**

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
		2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,51	23,33	-1,18
B	Pertambangan dan Penggalian	23,31	24,12	0,81
C	Industri Pengolahan	9,67	9,80	0,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mc	15,15	15,16	0,01
J U M L A H		72,63	72,41	-0,22

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa peranan kategori-kategori yang tidak begitu dominan dalam beberapa tahun juga tidak begitu mengalami perubahan struktur, artinya peran kategori-kategori tersebut terhadap fundamental ekonomi di Blora kemungkinan akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan.

**Tabel 4.5 Distribusi Prosentase Kategori Produktif PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2017**

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
		2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,00
F	Konstruksi	3,98	4,08	0,09
H	Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,61	0,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,21	3,24	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,96	0,97	0,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,00	3,04	0,04
L	Real Estate	1,23	1,22	-0,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wa	3,42	3,30	-0,12
P	Jasa Pendidikan	5,76	5,86	0,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,87	0,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,00	2,03	0,03
<b>J U M L A H</b>		<b>27,37</b>	<b>27,59</b>	<b>0,22</b>

Dilihat struktur perekonomian Kabupaten Blora dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya pergeseran fundamental ekonomi belum terjadi. Ketika beberapa kategori menjadi kategori dominan, sepertinya akan tetap seperti itu dalam kurun waktu yang lama. Sehingga bisa dikatakan untuk bisa merubah struktur suatu perekonomian, dibutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal maupun teknologi. Sehingga ketika suatu kategori dikatakan memiliki kontribusi yang kecil terhadap total PDRB maka hal itu akan tetap demikian selama belum ada upaya yang luar biasa untuk menggerakkan roda kategori-kategori tersebut.

Disamping terbagi ke dalam 17 kategori, PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing kategori ekonomi. Pengelompokan tersebut terdiri atas kategori primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, kategori sekunder yakni jika input berasal langsung dari kategori primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan kategori tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

Pengelompokan kategori PDRB terhadap kelompoknya adalah:

**Kelompok primer** : Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan/ penggalian.

**Kelompok sekunder** : lapangan industri pengolahan, pengadaan listrik/gas dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bangunan/konstruksi.

**Kelompok tersier** : Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha pengangkutan, pergudangan, lapangan usaha informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, adm pemerintahan /hankam dan jasa-jasa.

**Tabel 4.6 Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2017**

Kelompok Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Primer	47,82	47,45	-0,36
Kelompok Sekunder	13,75	13,97	0,23
Kelompok Tersier	38,44	38,57	0,14
<b>J U M L A H</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dari ketiga kelompok pada tabel 4.6 terlihat bahwa jika dibandingkan antara tahun 2017 terhadap tahun 2016, terlihat ada sedikit pergeseran kontribusi. Pada kelompok primer terjadi kenaikan kontribusi terhadap total PDRB sebaliknya pada kelompok sekunder dan tersier mengalami mengalami penurunan.

#### 4.4 PDRB Perkapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap

penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

**Tabel : 4.7 PDRB Perkapita adh Berlaku  
Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**

Tahun	PDRB Perkapita (Dengan Migas)	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	16.078.902,50	9,67
2014	17.842.461,35	10,97
2015	19.251.692,26	7,90
2016*	23.409.932,58	21,60
2017**	25.277.833,98	7,98

Ket: \* Angka Sementara    \*\* Angka Sangat Sementara

Dengan peran migas yang semakin besar, padahal nilai tambah Pertambangan dan Penggalan diperoleh tidak hanya output murninya (migas) saja yang dihitung tetapi evaluasi mineral dan eksplorasi dihitung sebagai output dan dikapitalisasi, maka dalam penghitungan PDRB perkapita dibuat dua tabel, PDRB perkapita (dengan migas) dan PDRB perkapita tanpa migas untuk bisa memberi gambaran yang lebih riil.

Dengan memasukkan minyak bumi, PDRB perkapita tahun 2017 tercatat sebesar 25,28 juta rupiah, meningkat 7,98 persen dari tahun sebelumnya. Karena penghitungan PDRB perkapita berdasarkan adh berlaku, maka punya kecenderungan PDRB perkapita terus meningkat.

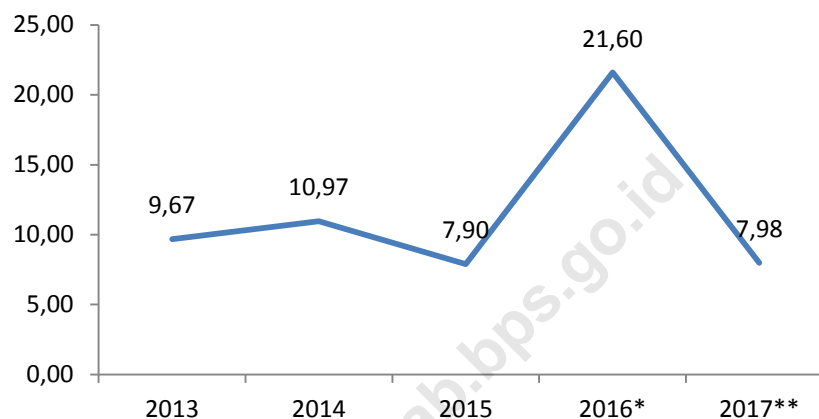
**Tabel : 4.8 PDRB Perkapita adh Berlaku  
Tanpa Migas Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**

Tahun	PDRB Perkapita (Tanpa Migas)	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	13.956.907,03	9,93
2014	15.387.203,56	10,25
2015	16.870.621,17	9,64
2016*	18.317.642,20	8,58
2017**	19.577.051,46	6,88

Ket: \* Angka Sementara    \*\* Angka Sangat Sementara

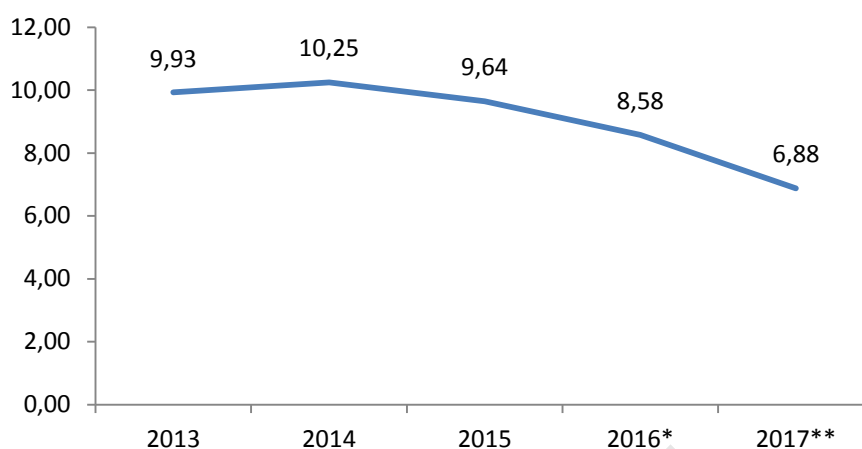
Sedangkan PDRB perkapita yang tanpa minyak pada tahun 2017 tercatat sebesar 19,58 juta rupiah, atau meningkat 6,88 persen dari tahun sebelumnya. Terlihat penambahan yang cukup signifikan dari eksplorasi gas dan minyak bumi.

**Gambar 4.4 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 (%)**



Jika memperhatikan tabel dan gambar perkembangan PDRB perkapita tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita akan berbanding lurus dengan besaran maupun pertumbuhan PDRB. Kondisi ini tidak lepas dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Untuk PDRB perkapita akan cenderung naik, namun demikian belumlah dapat dikatakan bahwa angka tersebut menggambarkan kemakmuran yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Blora tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Blora saja, akan tetapi ada yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk luar Kabupaten Blora yang melakukan investasi di Kabupaten Blora. Dengan demikian, PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat Blora, untuk itu perlu kajian khusus oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk meneliti sejauh mana tingkat pendapatan riil masyarakat Kabupaten Blora.

**Gambar 4.5 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 (%)**



#### 4.5 Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan adalah suatu indeks yang menggambarkan perkembangan angka PDRB yang dibandingkan dengan tahun dasar, yaitu membagi besaran PDRB pada suatu tahun t dengan besaran PDRB tahun 2010. Semakin besar angka suatu kategori berarti perkembangan kategori tersebut semakin cepat dan sebaliknya.

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 214,77 persen atau senilai 21,80 triliun rupiah, nilai tersebut telah meningkat 2,15 kali dari tahun dasar (tahun 2010). Sedangkan indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 165,96 persen atau senilai 16,84 triliun rupiah, atau nilai tersebut naik sebesar 1,66 kalinya dari tahun dasar.

**Tabel : 4.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	13.543.661,54	133,45	11.712.504,85	115,40
2014	15.101.975,26	148,80	12.227.201,29	120,48
2015	16.368.347,06	161,28	12.882.587,70	126,93
2016	19.993.674,30	197,00	15.913.432,03	156,80
2017	21.797.101,52	214,77	16.843.360,54	165,96



Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2017 kategori yang mengalami perkembangan tercepat adalah kategori B atau lapangan usaha Pertambangan Penggalian, dengan angka indeks sebesar 372,67 persen atau nilai tambah bruto lapangan usaha tersebut pada tahun 2017 naik 3,72 kali dari tahun dasar. Berikutnya adalah kategori P atau lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan indeks perkembangan sebesar 315,22 persen atau nilai tambah bruto kategori ini di tahun 2017 naik 3,15 kali dari tahun dasar. Disusul kategori Q atau lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan indeks perkembangan sebesar 238,38 persen atau nilai tambah bruto kategori tersebut naik 3,38 kali dari tahun dasar. Sedangkan indeks perkembangan terendah adalah kategori E atau lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tercatat sebesar 145,70 persen atau selama 7 tahun, kategori ini nilai tambah brutonya meningkat sebesar 1,46 kalinya dari nilai tambah bruto di tahun dasar.

Indeks perkembangan atas dasar harga konstan memiliki pola yang hampir sama dengan indeks perkembangan atas dasar harga berlaku. Dimana pada tahun 2017 kategori B atau lapangan usaha Pertambangan Penggalian tercatat memiliki indeks perkembangan terbesar, dengan angka indeks sebesar 312,83 persen atau nilai tambah bruto lapangan usaha tersebut pada tahun 2017 naik 3,13 kali dari tahun dasar. Berikutnya adalah kategori P atau lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan indeks perkembangan sebesar 202,02 persen atau nilai tambah bruto kategori ini di tahun 2017 naik 2,02 kali dari tahun dasar. Sedangkan indeks perkembangan terendah adalah kategori A atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tercatat sebesar 108,73 persen atau selama 6 tahun, kategori ini nilai tambah brutonya meningkat sebesar 1,09 kalinya dari nilai tambah bruto kategori tersebut di tahun dasar.

#### **4.6 Indeks Berantai**

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per kategori yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dikalikan 100. Bila nilai indeks berantai ini dikurangi 100 dikatakan sebagai laju pertumbuhan PDRB.

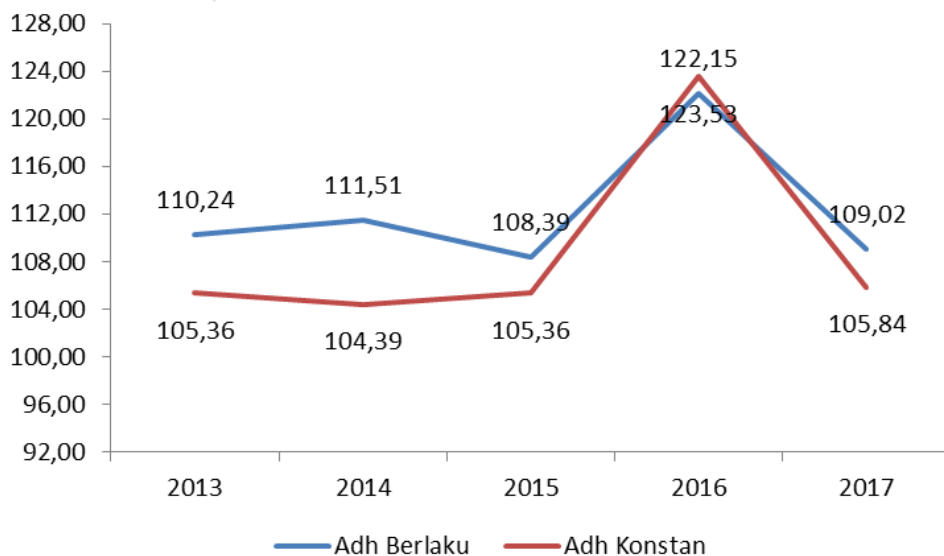
Indeks berantai diperoleh dengan cara membagi NTB adh berlaku/konstan tahun (t) dengan NTB adh berlaku/konstan tahun (t-1) dikali 100. Nilai Indeks berantai menurut harga

berlaku ini menggambarkan besarnya perkembangan agregat atau kategori yang dikarenakan oleh adanya perkembangan harga dan produksi. Sedangkan pergerakan indeks adh konstan mencerminkan perkembangan nilai riil produksi masing-masing kategori, dengan demikian indeks berantai adalah juga merupakan laju pertumbuhan PDRB apabila indeks tersebut dikurangi 100.

Untuk harga berlaku, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2017 tercatat sebesar 109,02 persen. Indeks berantai tertinggi dicapai oleh kategori B atau lapangan usaha Pertambangan Penggalian yang tercatat sebesar 112,82 persen, disusul kategori D atau lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan kategori F atau lapangan usaha konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar 112,53 persen dan 111,59 persen.

Sedangkan atas dasar harga konstan, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2017 tercatat sebesar 105,84 persen. Dengan indeks berantai tertinggi adalah kategori R,S,T,U atau lapangan usaha Jasa Lainnya dengan nilai indeks sebesar 108,48 persen, diikuti kategori F atau lapangan usaha Konstruksi yang tercatat sebesar 108,17 persen dan indeks terkecil adalah kategori O atau Administrasi Pemerintahan, Pertahanan yang tercatat sebesar 102,08 persen.

**Gambar 4.6 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**



#### 4.7 Laju Implisit (Inflasi PDRB)

Inflasi didefinisikan secara umum sebagai turunnya nilai mata uang (kebalikannya adalah deflasi). Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi, dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi atau bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

BPS menghitung inflasi menggunakan dua metode, *pertama* dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. *Kedua*, inflasi dihitung dengan memakai indeks implisit PDRB yang disebut sebagai inflasi PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya pun berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dilakukan dengan rumus:

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[ \frac{\text{indek implisit tahun } t}{\text{indek implisit tahun } (t - 1)} \right] - 1 \times 100\%$$

dimana:

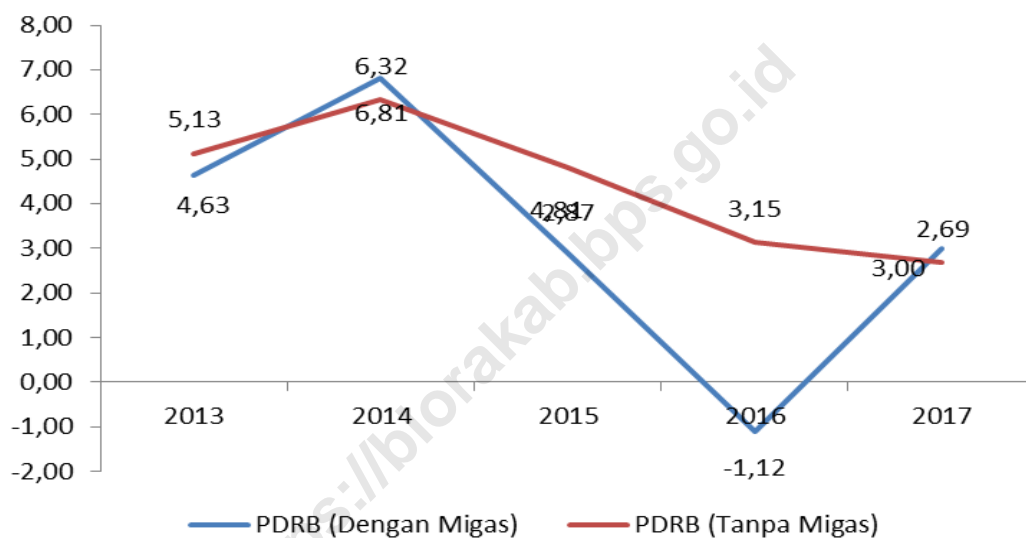
$$\text{indeks implisit} = \frac{\text{NTB adh berlaku kategori } i}{\text{NTB adh konstan kategori } i} \times 100\%$$

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, kenaikan harga telah memicu inflasi PDRB. Kondisi ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi, tetapi PDRB adh konstan pertumbuhannya lambat. Kondisi ini terjadi karena adanya pengaruh/ faktor harga pada setiap komoditinya.

Dalam kurun 5 tahun terakhir, laju indeks implisit PDRB di Kabupaten Blora bergerak cukup fluktuatif. Merentang dari minus 1,12 persen di tahun 2016 sampai 6,81 persen pada tahun 2014, seperti terlihat pada gambar 4.7. Laju implisit di tahun 2016 tercatat sebagai laju implisit terendah. Kondisi ini terjadi salah satunya adalah imbas dari penurunan harga migas

di tahun 2016. Dan apabila migas dikeluarkan, laju implisitnya merentang dari 2,69 persen di tahun 2017 hingga 6,32 persen di tahun 2014. Inflasi PDRB yang tinggi menandakan perekonomian Kabupaten Blora bergerak cukup dinamis walaupun disisi lain membuat kekuatiran bagi masyarakat karena untuk barang dan jasa yang sama harus mengeluarkan nilai uang yang lebih besar. Sehingga apabila tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

**Gambar 4.7 Laju Implisit PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2017**



Pada tahun 2017, laju implisit PDRB tertinggi terjadi pada kategori D atau lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tercatat sebesar 8,75 persen, diikuti kategori H atau lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan kategori C atau lapangan usaha Industri Pengolahan, yang masing-masing tercatat sebesar 6,23 persen dan 4,75 persen. Sedangkan yang terendah adalah kategori A atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen.

## 4.8 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha

### 4.8.1 Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Blora. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan yang besar dari kategori tersebut terhadap PDRB Kabupaten Blora. Di dalam penghitungan PDRB, lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbagi dalam beberapa sub lapangan usaha, yakni sub lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; sub lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu; serta sub lapangan usaha Perikanan. Pada tahun 2017 besarnya sumbangan lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB tercatat sebesar 23,33 persen atau senilai 5,09 triliun rupiah, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 3,33 persen.

#### **4.8.1.1 Sub Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian**

Sub lapangan usaha ini terdiri dari kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan dari sub kategori tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan PDRB kabupaten Blora, karena peran sub lapangan usaha ini cukup besar. Berikut gambaran output dari sub kategori ini yang terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Pertanian Tanaman Pangan**

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi salah satu kendala rencana peningkatan produksi di bidang pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui usaha intensifikasi pertanian maupun usaha-usaha lainnya seperti meningkatkan luas panen terutama pada komoditi padi dan palawija. Program intensifikasi pertanian dilakukan salah satunya melalui program sapa usaha tani, yaitu: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama, pengolahan pasca panen dan pemasaran. Saat ini banyak masyarakat petani di pinggir kawasan hutan berusaha memanfaatkan lahan bekas tebangan untuk ditanami dengan tanaman padi palawija. Sehingga secara sadar atau tidak bahwa upaya tersebut sebagai bagian dalam meningkatkan luas panen.

Lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan di Blora didominasi oleh produksi padi dan palawija. Menjadikan Blora sebagai lumbung pertanian utamanya produksi padi dan palawija masih terbuka lebar, mengingat luas lahan pertanian yang masih cukup luas dan lahan hutan yang bisa digunakan untuk budidaya pertanian. Saat ini luas lahan sawah yang mencapai sekitar 46 juta hektar, setiap tahunnya bisa menghasilkan gabah kering giling sekitar 500 ribu ton. Dan seandainya 10 persen dari luas hutan dan tegalan bisa ditanami padi atau palawija, tentunya tidak mustahil apabila Blora menjadi salah satu kabupaten lumbung pertanian nasional.

Berikut luas penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Lahan sawah	: 46.035,71 Ha.
2. Lahan tegal/kebunan	: 26.188,52 Ha.
3. Hutan	: 90.416,52 Ha.

---

Jumlah	: 162.640,75 Ha.
--------	------------------

Di dalam penghitungan nilai tambah bruto pertanian adalah dengan mengalikan besarnya produksi pertanian dengan harga dikurangi dengan biaya-biaya. Sehingga banyaknya produksi akan berbanding lurus dengan besarnya nilai tambah bruto. Besarnya produksi dipengaruhi oleh luas panen dan produktifitas. Sehingga ketika nilai tambah bruto ingin dinaikkan langkah pertama adalah meningkatkan produksi pertanian. Ketika lahan pertanian mulai berkurang, pemanfaatan lahan hutan (bekas tebangan) untuk ditanami dengan tanaman padi maupun palawija bisa menjadi solusi untuk peningkatan produksi pada dan palawija.

Pada tahun 2017 produksi padi dalam bentuk gabah kering giling naik dari 532.755 ton di tahun 2016 menjadi 596.140 ton di tahun 2017 atau naik 11,89 persen. Naiknya produksi gabah ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, karena dari gabah sendiri memberikan *share* yang cukup besar. Sedangkan untuk produksi palawija di tahun yang sama, produksi jagung turun sebesar 0,62 persen. Ubi kayu pada tahun 2016 produksinya sebesar 51.712 ton dan di tahun 2017 produksinya sebesar 44.836 ton atau turun 13,30 persen. Sehingga secara umum produksi palawija ada yang naik di tahun 2017 dan sebagian lagi mengalami penurunan .

## 2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Yang masuk ke dalam pertanian tanaman hortikultura dan banyak ditemui di Kabupaten Blora antara lain jenis sayuran: bawang merah, cabe, bayam, sawi, kangkung, ketimun, terong, tomat dan lainnya. Untuk buah-buahannya seperti mangga, pisang, jambu biji, jeruk, semangka, melon dan lainnya, sedangkan untuk jenis tanaman hias masih jarang ditemui budidayanya. Sebenarnya dengan luasnya lahan tegalan di Blora, potensi tanaman hortikultura khususnya buah-buahan bisa dikembangkan. Tetapi sifat pemeliharaannya yang masih tradisional dan sifatnya juga masih sebatas pengisi lahan kosong, sehingga potensi hortikultura khususnya tanaman buah-buahan belum begitu menggembirakan.

Pada tahun 2017 produksi buah-buahan yang banyak ditemui di Kabupaten Blora ada yang mengalami kenaikan produksi dan ada yang mengalami penurunan produksi. Faktor iklim dan cuaca menjadi penyebab utama kondisi tersebut. Iklim yang basah dan curah hujan yang tinggi berdampak pada gagalnya buah-buahan untuk berbuah, tetapi sepertinya iklim di tahun tersebut cukup baik. Untuk mangga produksinya cukup baik, tercatat sebesar 24.793 ton, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17.660 ton. Demikian juga produksi pisang mengalami kenaikan sebesar 36,05 persen, dari 23.111 ton di tahun 2016 menjadi 31.442 ton di tahun 2017, dan jeruk siam yang juga merupakan primadona di Kabupaten Blora, di tahun 2017 ini cukup baik produksinya. Tercatat sebesar 2.699 ton. Sedangkan buah-buahan yang produksinya mengalami penurunan salah satunya adalah semangka. Di tahun 2016 produksi semangka mencapai angka 3.239 ton tetapi di tahun 2017 hanya memproduksi sebesar 1.910 ton, atau turun sebesar 41,03 persen.

Kenaikan dan penurunan produksi komoditas sayuran-sayuran menawarnai produktifitas sayuran di Kabupaten Blora pada tahun 2017. Bawang merah, terung, tomat dan cabe besar serta cabe rawit pada tahun 2017 produksinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan masing masing komoditas adalah 12,69 persen, 72,02 persen, 29,28 persen dan 76,72 dan 57,19 persen. Sedangkan untuk kacang panjang mengalami penurunan sebesar minus 19,00 persen sehingga secara umum produksi sayur mayur di Blora tahun 2017 cukup menggembirakan.

### **3. Perkebunan**

Budidaya tanaman perkebunan di Kabupaten Blora tidak begitu banyak macamnya, yang banyak ditemui antara lain adalah tebu, tembakau, kelapa, jambu mete dan empon-empon. Tapi dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang mulai budidaya tebu, salah satu pendorongnya karena di Blora baru saja didirikan pabrik gula di Kecamatan Todanan.

Kondisi di tahun 2017 ada kecenderungan produk perkebunan yang dominan di Blora, produksinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali empon-empon atau tanaman biofarmaka.

### **4. Peternakan**

Blora dikenal sebagai daerah potensi peternakan khususnya sapi potong. Disamping sapi potong, ternak lainnya juga banyak dipelihara oleh masyarakat Blora, seperti: kambing,

domba maupun ayam, baik ayam ras maupun bukan ras. Sedangkan hasil peternakan lainnya antara lain adalah susu dan telur. Besarnya populasi ternak yang ada di Blora ternyata belum sebanding dengan nilai tambah brutonya. Sebagai contoh pertambahan berat sapi atau perkembangbiakan sapi, bisa dikatakan sangat lambat. Demikian juga dengan ternak-ternak lainnya. Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena sistem pemeliharaan ternak oleh masyarakat masih bersifat tradisional. Padahal didalam penghitungan nilai tambah bruto salah satu indikatornya antara lain produksi daging untuk ternak besar, kecil dan unggas dan produksi telur dan susu untuk produk ternak lainnya.

Pada tahun 2017 hampir semua populasi ternak besar dan kecil mengalami peningkatan populasi dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya untuk unggas populasinya cenderung menurun tetapi produk unggas seperti telur mengalami peningkatan. Populasi sapi potong di akhir tahun 2017 tercatat sebesar 231.045 ekor, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 222.718, sedangkan populasi kambing dan domba di tahun yang sama masing-masing tercatat sebesar 133.582 ekor dan 17.696 ekor, juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan ayam buras dan ayam ras pedaging populasi di akhir tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan kondisi ternak yang dipotong pada tahun yang sama cukup bervariasi. Sapi yang dipotong pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan domba, ayam kampung dan itik. Sedangkan untuk produksi hasil-hasil peternakan yang terdiri dari telur dan susu juga cukup bervariasi. Pada tahun 2017 produksi susu turun sedikit dibanding tahun sebelumnya, tetapi produksi telur ayam buras maupun ayam ras petelur mengalami peningkatan. Di tahun 2017, produksi telur ayam ras petelur sebesar 2.415 ton dan produksi telur ayam buras sebesar 1.359 ton.

## **5. Jasa Pertanian dan Perburuan**

Jasa pertanian merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pertanian, baik pertanian padi palawija, hortikultura, perkebunan dan pertanian lainnya. Termasuk jasa pertanian antara lain jasa penanaman, jasa pemanenan hasil pertanian, jasa pengelolaan lahan, jasa persewaan alat pertanian, jasa pemberantasan hama serta jasa-jasa lainnya. Sedangkan perburuan adalah kegiatan menangkap hewan liar, atau mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan liar, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kegiatan jasa pertanian sangat menunjang usaha pertanian. Hampir sebagian besar kegiatan pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja, apalagi pertanian padi dan palawija.



Sehingga usaha pertanian dikatakan sebagai kegiatan yang padat tenaga kerja. Tenaga kerja pertanian yang mendapat balas jasa berupa barang atau uang dengan hitungan harian/mingguan disebut sebagai buruh tani. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa pertanian di sini adalah usaha dibidang pertanian yang sifatnya borongan atau bukan sebagai buruh tani. Dimasyarakat yang banyak kita temui adalah jasa pengolahan lahan. Sedangkan untuk penanaman dan pemanenan bisanya dilakukan oleh buruh tani.

#### **4.8.1.2 Sub Lapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu**

Potensi kehutanan di Kabupaten Blora didominasi oleh hutan negara yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Blora. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa areal hutan negara tidak/kurang produktif lagi sehingga kurang mampu meningkatkan output di sub kategori kehutanan. Terdapat tiga wilayah pemangkuan hutan yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu dan KPH Blora. Ketiga KPH tersebut bertugas mengawasi lokasi hutan negara di kecamatan yang menjadi tugasnya. Wilayah Kabupaten Blora juga cocok dan cukup potensial untuk pengembangan hutan rakyat, karena struktur tanah dan iklimnya cukup mendukung. Kecamatan yang memiliki hutan rakyat antara lain: Jiken, Bogorejo, Jepon, Blora, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.

Produk kehutanan yang banyak dijumpai di Blora antara lain kayu jati, kayu rimba dan kayu bakar baik produksi dari hutan negara maupun usaha budi daya masyarakat. Disamping kayu-kayuan termasuk produk kehutanan lainnya adalah bambu, arang, sarang burung walet maupun hasil kegiatan lainnya yang memanfaatkan hutan sebagai sarannya seperti penangkapan satwa liar di hutan maupun pengambilan daun jati oleh masyarakat termasuk juga pengambilan tanaman obat-obatan dari hutan.

#### **4.8.1.3 Sub Lapangan Usaha Perikanan**

Selama ini sub kategori perikanan di Kabupaten Blora di sumbang oleh budidaya perikanan kolam dan produksi perikanan dari perairan umum, yang meliputi sungai, cek dam dan embung. Untuk kolam hampir merata ada disetiap kecamatan, tetapi luas yang kecil sehingga produksi yang didapat masih sangat kecil. Demikian juga sumbangan dari hasil budidaya perikanan dari waduk relatif masih sangat kecil karena hanya berasal dari Kecamatan Blora dan Tunjungan. Selama tahun 2017 produksi perikanan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai tambah bruto di kegiatan perikanan ini.

## **4.8.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian**

Kategori B, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian terdiri atas 4 sub lapangan usaha. Untuk Kabupaten Blora hanya ada dua sub lapangan usaha, yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Penerapan SNA 2008 menambah cakupan di lapangan usaha ini, khususnya sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi. Sebelumnya nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini hanya *lifting* minyak mentah dan gas, tetapi dengan penerapan SNA 2008 cakupannya bertambah tidak hanya dalam bentuk minyak bumi maupun gas tetapi aktifitas yang berkaitan dengan pembentukan modal tetap bruto dan evaluasi barang tambang juga dihitung sebagai output sebagai dasar penghitungan nilai tambah bruto. Sehingga nilai tambah bruto nilainya berlipat dibandingkan dengan tahun dasar 2000.

Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha Pertambangan Penggalian pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,26 triliun rupiah adh berlaku, memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 24,12 persen. Sedangkan menurut harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 4,76 triliun rupiah. Sedangkan pertumbuhan nilai tambah bruto kategori ini di tahun tersebut tercatat sebesar 7,93 persen. Kategori Pertambangan Penggalian terdiri atas dua sub kategori sebagai berikut:

### **4.8.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi**

Sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi outputnya adalah eksplorasi dan evaluasi barang tambang serta belanja modal atau pembentukan modal tetap bruto dalam kegiatan pertambangan. Merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai kegiatan pertambangan minyak bumi. Selain minyak bumi, Kabupaten Blora juga memiliki potensi gas alam, dan sudah mulai berproduksi secara komersial pada akhir tahun 2015. Dan produksi optimalnya di tahun 2016, sehingga pertumbuhan yang fantastis terjadi di tahun 2017 yang tercatat sebesar 101,30 persen nilai tambah bruto adh berlaku dan 119,79 persen pertumbuhan nilai tambah bruto adh konstan.

### **4.8.2.2 Pertambangan dan Penggalian Lainnya**

Berikutnya adalah sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Blora, sub lapangan usaha ini hanya ada kegiatan penggalian terutama penggalian golongan C seperti pasir, batu dan tanah urug. Sebenarnya Blora punya potensi yang cukup besar, tetapi pemanfaatan dan pengelolaannya belum sesuai apa yang diharapkan. Jenis bahan

galian belum banyak dieksploitasi secara optimal dan diperkirakan mempunyai cadangan yang cukup besar dan potensi yang cukup tinggi. Beberapa jenis komoditi sub kategori penggalian tersebar di beberapa kecamatan dengan potensinya antara lain :

<b>Sirtu</b>	: Kecamatan Kradenan, Ngawen dan Cepu.
<b>Pasir kuarsa</b>	: Kecamatan Todanan, Japah, Tunjungan, Bogorejo, dan Kecamatan Jepon.
<b>Batu Pasir</b>	: Kecamatan Japah, Tunjungan dan Todanan
<b>Tanah liat</b>	: Kecamatan Blora dan Todanan
<b>Gypsum</b>	: Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Bogorejo dan Kecamatan Cepu.
<b>Phospat</b>	: Kecamatan Todanan.
<b>Kalsit</b>	: Kecamatan Todanan.
<b>Ball Clay</b>	: Kecamatan Todanan, Tunjungan, Bogorejo.
<b>Batu Gamping</b>	: Kecamatan Randublatung, Kradenan, Sambong, Japah, Tunjungan, Bogorejo, Jepon, Jiken dan Kecamatan Todanan.

#### 4.8.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Industri: adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan baku/bahan mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami angka-angka yang ditampilkan dalam kategori ini, BPS Kabupaten Blora mengacu pada konsep dan definisi yang dibakukan oleh BPS Pusat, dimana konsep tentang industri di kelompokkan atau digolongkan menjadi empat.

Kriteria industri sebagai berikut:

1. Industri Besar : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 orang.
2. Industri Sedang : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 - 99 orang.
3. Industri Kecil : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 orang.

4. Industri RT : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 1 - 4 orang.

Perubahan tahun dasar 2000 menjadi tahun 2010 mengaplikasikan SNA 2008. Penerapan ini berdampak pada peningkatan level PDRB, karena ada perubahan konsep, penambahan cakupan dan perbaikan data. Perubahan konsep contohnya hasil industri yang dikonsumsi sendiri ikut diperhitungkan nilainya sebagai output. Penambahan cakupan contohnya masuknya industri pengilangan migas walaupun sifatnya hanya sebagai bahan studi. Perbaikan data contohnya untuk industri pengolahan tembakau, cukai yang diberikan dimasukkan sebagai output pada industri tersebut, dan lain sebagainya.

Dengan SNA 2008, lapangan usaha industri pengolahan meliputi 16 sub lapangan usaha yaitu: industri batubara dan pengilangan minyak; industri makanan, minuman, industri tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu, gabus, anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; industri furniture; dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,14 triliun rupiah *adh berlaku*, memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,80 persen. Sedangkan menurut harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 1,44 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sumbangan terhadap PDRB tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Sedangkan pertumbuhan nilai tambah bruto kategori industri pengolahan tercatat sebesar 5,49 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

#### **4.8.4 Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori D atau lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, terbagi menjadi dua sub lapangan usaha, sub lapangan usaha ketenagalistrikan dan sub lapangan usaha pengadaan gas dan produksi es. Penghitungan nilai tambah bruto ketenagalistrikan adalah listrik yang terjual dalam hal ini oleh PLN, dikurangi dengan subsidi yang diterima. Untuk sub kategori pengadaan gas, saat ini sudah ada di Blora. Sekitar pertengahan tahun 2017 ada beberapa

rumah tangga yang sudah dialiri gas kota, yaitu di Desa Sumber Kecamatan Kradenan. Sedangkan yang banyak ditemui pada sub lapangan usaha ini adalah produksi es.

Peningkatan jumlah pelanggan listrik cukup berdampak positif pada pertumbuhan di sub lapangan usaha ketenagalistrikan. Diharapkan semakin banyak pelanggan, KWH listrik yang terjual akan semakin besar. Disisi lain perhitungan nilai tambah kategori ini adalah listrik yang terjual dengan harga per KWH yang diperhitungkan dengan subsidi yang diberikan. Jumlah pelanggan listrik di tahun 2017 tercatat sebesar 243.406 pelanggan, dengan listrik terjual sebesar kurang lebih sebesar 303.211 MWh.

Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,48 persen (adh konstan) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,35 persen. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2017 sangat kecil yaitu sebesar 0,06 persen adh berlaku dan 0,07 persen adh konstan. Meskipun sumbangan dari kategori ini terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan usaha yang sangat vital yang diperlukan untuk keberlangsungan hajat hidup masyarakat.

#### **4.8.5 Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang**

Penerapan SNA 2008 memecah sektor listrik, gas dan air bersih menjadi kategori D dan E atau lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dan penerapan ini dimulai tahun 2010 bersamaan dengan perubahan tahun dasar baru.

Kategori E atau lapangan Usaha Pengeadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang mencakup kegiatan antara lain pengadaan air bersih dari PDAM, pamsimas dan pengadaan air swasta lainnya dan kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang sampah. Tetapi dari semua kegiatan di atas, hanya PDAM yang datanya bisa diperoleh dengan baik, lainnya diperoleh dari melalui survei dan estimasi dari beberapa data pendukung, terutama untuk pengelolaan sampah dan daur ulang.

Kebutuhan akan air bersih, ternyata berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga pertumbuhan penduduk secara tidak langsung ikut meningkatkan jumlah pelanggan PDAM, dan kecenderungan setiap tahun jumlah pelanggan PDAM utamanya di Kabupaten Blora terus meningkat. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan PDAM meningkat sebesar 7,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup pesat, tetapi di lapangan kurang diimbangi dengan ketersediaan pasokan air baku. Peningkatan jumlah pelanggan sedikit banyak berimbas pada nilai tambah bruto di lapangan usaha ini. Sedangkan untuk

penghitungan kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang sifatnya masih sangat kasar, karena ketidakterediaan data oleh dinas/instansi atau lembaga. Disisi lain kegiatan pencatatan untuk tersebut juga masih sangat lemah.

**Tabel : 4.10. Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Blora Tahun 2013–2017**

<b>Tahun</b>	<b>P D A M</b>
(1)	(2)
2013	12.926
2014	13.671
2015	13.712
2016	15.157
2017	16.264

*Sumber: Blora Dalam Angka, 2018*

Beberapa tahun terakhir PDAM Kabupaten Blora berusaha untuk menambah sumber air baku. Dengan bertambahnya pelanggan dan penambahan supply air baku, sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah bruto. Kendala utama pada ketersediaan air baku, terutama pada musim kemarau, dimana pada musim kemarau ini beberapa waduk di Kabupaten Blora yang menjadi air baku PDAM debit airnya menurun bahkan ada yang mengalami kekeringan, akibatnya jumlah pemakaian air oleh masyarakat juga ikut menurun.

Pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,65 persen (adh konstan). Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2017 sangat kecil, tercatat hanya sebesar 0,04 persen adh berlaku atau senilai 7.525,55 juta rupiah, sedangkan nilai tambah lapangan usaha ini adh konstan tercatat sebesar 6.553,96 juta rupiah. Meskipun sumbangan dari kategori ini terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan usaha yang cukup vital untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

#### **4.8.6 Lapangan Usaha Bangunan/Konstruksi**

Kegiatan konstruksi diprediksi akan terus tumbuh cukup baik dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia akan infrastruktur yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, kebutuhan pengusaha akan

tempat usaha dan program-program pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana umum, baik jalan, jembatan maupun gedung dan konstruksi lainnya.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini masih didominasi kegiatan konstruksi swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha. Sedangkan peran konstruksi pemerintah prosentase masih lebih rendah. Tetapi walaupun demikian peran pemerintah sebagai pendorong pembangunan melalui pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya tidak bisa diabaikan.

Pada tahun 2017 kategori F atau lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 8,17 persen, naik tipis dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,67 persen. Dengan nilai tambah bruto 888.573,41 juta rupiah *adh* berlaku dan 642.225,32 juta rupiah *adh* konstan. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB di tahun 2017 tercatat sebesar 4,08 persen.

#### **4.8.7 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Lapangan usaha ini tersusun atas dua sub lapangan usaha, sub lapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya dan sub lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Perhitungan nilai tambah bruto (ntb) lapangan ini memakai metode arus barang yaitu dengan cara menghitung besarnya margin barang dan jasa yang diperdagangkan dari lapangan usaha pertanian, industri, dan pertambangan penggalian serta barang/jasa yang dari luar wilayah Kabupaten Blora. Metode arus barang yang digunakan pada saat ini masih dipertahankan karena belum ada metode lain yang lebih representatif. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang cukup potensial karena kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini menduduki peringkat ketiga setelah kategori Pertambangan Penggalian.

Pada tahun 2017, nilai tambah bruto lapangan usaha ini *adh* berlaku tercatat sebesar 3.303.964,99 juta rupiah dengan share terhadap PDRB tercatat sebesar 15,16 persen. Sedangkan *adh* konstan di tahun yang sama, nilai tambahnya tercatat sebesar 2.656.490,73 juta rupiah dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 5,39 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,85 persen.

##### **4.8.7.1 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.**

Perkembangan tingkat kemakmuran penduduk biasanya diiringi dengan pertambahan kebutuhan barang-barang sekunder, salah satunya kepemilikan kendaraan bermotor, walaupun saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Kendaraan

bermotor sangat urgen dalam menunjang kehidupan sehari-hari maupun untuk kelancaran bisnis atau usaha.

**Tabel : 4.11. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora Tahun 2014–2017**

Jenis	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mobil penumpang	9.716	10.636	11.654	13..844
2. Mobil beban	6.539	7.173	7.533	8.236
3. Bus/Micro bus	462	489	522	572
4. Sepeda motor	233.104	259.868	274.226	292.188
Jumlah	249.821	278.166	293.935	314.840

*Sumber: Blora Dalam Angka, 2018*

Dari tabel 4.18 terlihat perkembangan jumlah kendaraan yang cenderung terus bertambah, apalagi sepeda motor. Nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini adalah margin dari perdagangan kendaraan bermotor dan jasa reparasinya. Pada tahun 2017 pertumbuhan kendaraan beban cukup bagus. Kondisi ini cukup menggembirakan, karena kendaraan beban tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan usaha, yang secara tidak langsung memiliki *multiplier effect* bagus untuk mendorong roda ekonomi terutama di Kabupaten Blora.

#### **4.8.7.2 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.**

Nilai tambah bruto diperoleh dari margin barang yang diperdagangkan dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan/penggalian dan lapangan industri pengolahan serta margin barang perdagangan barang-barang yang berasal dari luar wilayah Blora. Sehingga pertumbuhan sub lapangan usaha ini disamping karena pertumbuhan lapangan usaha primer ditambah lapangan usaha industri pengolahan, juga sangat dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, kemampuan daya beli dan gaya hidup masyarakat.

#### **4.8.8 Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan**

Kategori H atau lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri atas enam sub lapangan usaha, yaitu sub lapangan usaha angkutan rel, angkutan darat, sub lapangan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa



penunjang angkutan, pos dan kurir, dan yang tidak ada kegiatannya di Blora yaitu sub lapangan usaha angkutan laut dan angkutan udara.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2017 tercatat sebesar 569.766,53 juta rupiah adh berlaku dan 467.442,07 juta rupiah adh konstan atau tumbuh sebesar 4,85 persen. Sumbangan kategori ini terhadap PDRB tercatat sebesar 2,61 persen. Pada tahun 2017 ini pertumbuhan nilai tambah bruto lapangan usaha ini didominasi oleh kenaikan output dari angkutan barang. Distribusi barang terutama barang galian dari wilayah Blora ke luar kabupaten cukup tinggi terutama penggalian galian C. Sedangkan angkutan manusia cenderung stagnan. Kondisi ini terutama pengaruh dari kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil penumpang.

#### **4.8.8.1 Sub Lapangan Usaha Angkutan Rel**

Angkutan transportasi darat saat ini dikembangkan dengan 2 jenis moda angkutan, yaitu moda angkutan jalan raya dan moda angkutan jalan rel/kereta api. Perkembangan perkeretaapian terus berjalan termasuk dalam rancang bangun, teknologi komunikasi dan informasi, dan teknologi bahan. Hal ini membawa pula perkembangan sarana dan prasarana kereta api. Wilayah Blora dilalui oleh angkutan kereta api, utamanya di kecamatan-kecamatan sebelah selatan, yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Kedungtuban dan Cepu. Ada perbaikan pelayanan kereta api akhir-akhir ini, sehingga peminat angkutan ini terus bertambah.

#### **4.8.8.2 Sub Lapangan Usaha Angkutan Darat**

Sub lapangan usaha angkutan darat terdiri atas angkutan orang dan barang seperti angkutan bus/mini bus, angkutan truk dan angkutan orang dan barang lainnya. Peran angkutan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur terutama jalan, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kegiatan ini. Tetapi disisi lain ada kendala-kendala yang ditemui dalam perjalanannya, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga komponen atau suku cadang kendaraan bermotor.

#### **4.8.8.3 Sub Lapangan Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Sub Lapangan Usaha Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir**

Sub lapangan usaha penyeberangan di Kabupaten Blora ada di Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan, berupa penyeberangan sungai. Sedangkan lainnya berupa angkutan wisata yang ada di waduk Tempuran dan waduk Greneng. Meskipun kategori angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi relatif kecil terhadap total PDRB namun berperan cukup

penting dalam menunjang kelancaran perputaran roda perekonomian di Kabupaten Blera khususnya dalam kelancaran distribusi barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

#### **4.8.9 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri atas dua sub lapangan usahanya, yaitu sub lapangan usaha akomodasi dan sub lapangan usaha penyediaan makan minum. Sub lapangan usaha penyediaan akomodasi didominasi oleh kegiatan perhotelan. Jumlah hotel di Kabupaten Blera ada sekitar 32 hotel, yang terdiri atas 4 hotel berbintang dan 28 hotel non bintang. Dimana nilai tambah brutonya dihitung berdasarkan jumlah malam menginap tamu hotel. Disamping perhotelan nilai tambah sub lapangan usaha ini juga diperoleh dari usaha penginapan kamar (kost-kost an) yang juga banyak ditemui di Blera terutama diperkotaan. Sedangkan penyediaan makan minum terdiri atas kegiatan mulai dari restoran, warung makan sampai dengan penjaja makanan keliling. Nilai tambah penyediaan makan minum cukup besar. Pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan maupun tingkat kemakmuran masyarakat secara signifikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sub kategori penyediaan makan minum.

Pada tahun 2017 nilai tambah bruto lapangan usaha ini tercatat sebesar 705.379,74 juta rupiah adh berlaku dan 547.258,50 juta rupiah adh konstan, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,24 persen. Lapangan usaha ini tumbuh dengan baik di tahun 2017, yang tercatat sebesar 6,38 persen.

#### **4.8.10 Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi**

Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan orang dengan cepat mengetahui berita dan dengan cepat pula mengirimkan berita, jadi terciptalah komunikasi yang efektif. Kini teknologi informasi komunikasi memperpendek waktu secara lebih drastis. Suatu berita dapat mencapai keseluruhan dunia dalam waktu beberapa menit lewat berita yang cepat dari berbagai penemuan. Demikianlah teknologi informasi mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Teknolgi informasi menyebabkan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah. Dan juga menyebabkan informasi tentang keadaan konsumen, harga bahan mentah dan keadaan pasar di semua negara dapat diketahui dengan mudah dan cepat.

Perkembangan teknologi komunikasi juga merubah gaya hidup seseorang. Lewat sosial media menjadikan seseorang bisa berinteraksi dengan mudah. Model komunikasi yang sudah ada sebelumnya, terutama sms berangsur berkurang, beralih ke komunikasi berbasis internet

yang berkembang dengan pesat. Kebutuhan masyarakat akan paket data pun semakin meningkat.

Pada tahun 2017 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,97 persen dengan nilai tambah bruto sebesar 211.925,92 juta rupiah adh berlaku dan 223.363,67 juta rupiah adh konstan, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 6,26 persen. Walaupun *share* kategori ini relatif kecil perannya cukup besar dalam mendorong perkembangan ekonomi suatu wilayah.

#### **4.8.11 Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi**

Lapangan usaha ini terdiri dari beberapa sub lapangan usaha yaitu sub lapangan usaha jasa perantara keuangan, sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun, sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya dan sub lapangan usaha jasa penunjang keuangan. Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2017 tercatat sebesar 662.022,28 juta rupiah adh berlaku dan 465.146,47 juta rupiah adh konstan. Pertumbuhan nilai tambah bruto kategori ini pada tahun tersebut sebesar 5,91 persen, sedangkan sumbangan terhadap PDRB sebesar 2,76 persen.

#### **4.8.12 Lapangan Usaha Real Estate**

Dengan penerapan SNA 2008, kegiatan real estate menjadi lapangan usaha sendiri, dimana sebelumnya merupakan bagian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Lapangan usaha ini didominasi oleh kepemilikan properti yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan properti oleh rumah tangga dihitung sebagai output, sesuai konsep *Owner Occupied Dwelling* (OOD), yaitu mengestimasi output properti yang digunakan oleh rumah tangga sendiri. Selain itu persewaan properti seperti bangunan tempat tinggal dan bangunan untuk usaha juga masuk di dalam lapangan usaha ini.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2017 tercatat sebesar 266.989,33 juta rupiah adh berlaku, atau memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 1,22 persen. Sedangkan adh konstan nilai tambahnya tercatat sebesar 228.083,98 juta rupiah adh konstan. Pertumbuhan nilai tambah bruto kategori ini pada tahun yang sama tercatat sebesar 5,49 persen.

#### **4.8.13 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan**

Kegiatan yang masuk dalam lapangan usaha ini antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli, tehnis dan jasa bisnis lainnya, jasa persewaan (persewaan alat pesta, persewaan alat-

alat pertanian dan sebagainya), juga jasa pendukung lainnya seperti jasa penyaluran tenaga kerja, biro perjalanan wisata, jasa fotocopy dan lainnya. Sedangkan kegiatannya yang banyak ditemui di Blora adalah jasa persewaan, seperti persewaan alat pesta, jasa forografi, persewaan alat-alat pertanian tanpa hak opsi dan jasa perusahaan lainnya seperti biro perjalanan wisata.

Pada tahun 2017 kategori ini mengalami pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 4,86 persen. Dengan nilai tambah bruto sebesar 60.460,15 juta rupiah adh berlaku dan 44.484,19 juta rupiah adh konstan, sehingga kontribusi terhadap PDRB pada tahun yang sama tercatat sebesar 0,28 persen.

#### **4.8.14 Lapangan Usaha Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Belanja pemerintah terdiri atas gaji dan belanja rutin lainnya, masuk sebagai nilai tambah lapangan usaha ini. Belanja yang dimaksud tidak hanya belanja pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) saja, tetapi juga belanja instansi/lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah. Termasuk belanja pemerintahan desa/kelurahan.

Komponen utama nilai tambah bruto Lapangan usaha ini adalah belanja pegawai dan belanja rutin. Pada tahun 2017 belanja pegawai naik cukup signifikan, ditengah adanya optimalisasi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran belanja.

Pada tahun 2017 nilai tambah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tercatat sebesar 719.551,51 juta rupiah adh berlaku dan 506.181,72 juta rupiah adh konstan. Sumbangan terhadap PDRB tercatat sebesar 3,30 persen, dimana pada tahun yang sama nilai tambah bruto lapangan usaha ini tumbuh sebesar 2,08 persen.

#### **4.8.15 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan**

Jasa pendidikan dimana untuk penghitungan PDRB tahun dasar 2000 yang dihitung hanya untuk kegiatan jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta, tetapi dengan penerapan SNA 2008 jasa pendidikan yang dihitung tidak hanya yang dikelola oleh swasta, tetapi dana-dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah untuk kegiatan pendidikan swasta juga ikut dihitung nilai tambahnya.

Wajib belajar 12 tahun dan amanat undang-undang yang mewajibkan 20 persen APBN untuk pendidikan sangat berdampak pada level PDRB. Peran atau sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB naik secara signifikan.

Nilai tambah bruto lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.277.292,96 juta rupiah adh berlaku dan 872.932,25 juta rupiah adh konstan. Sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB sebesar 5,86 persen dan pertumbuhan nilai tambah bruto pada tahun yang sama sebesar 6,64 persen (adh konstan).

#### **4.8.16 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Pembangunan tidak akan mungkin berhasil tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan selama beberapa dekade terakhir diakui cukup berhasil, terutama pembangunan infrastruktur kesehatan yang telah menyentuh hampir seluruh kecamatan bahkan sampai pedesaan.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini terdiri atas kegiatan jasa kesehatan rumah sakit, balai pengobatan, dokter dan bidan serta pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2017 pertumbuhan nilai tambah kegiatan ini tercatat sebesar 6,48 persen (adh konstan), dengan nilai tambah bruto sebesar 189.030,87 juta rupiah adh berlaku dan 139.845,37 juta rupiah adh konstan. Sumbangan kegiatan ini terhadap PDRB adalah sebesar 0,87 persen.

#### **4.8.17 Lapangan Usaha Jasa Lainnya**

Lingkup kegiatan lapangan usaha jasa lainnya sangat banyak, antara lain:

- a. Jasa kesenian hiburan dan rekreasi, yang terdiri dari kegiatan seni pertunjukan, kegiatan pekerja seni, kegiatan hiburan, kegiatan pariwisata, taman budaya, taman nasional, kegiatan olah raga, dan lain sebagainya.
- b. Jasa reparasi barang-barang rumah tangga, antara lain: reparasi elektronik, reparasi perabot rumah tangga, reparasi perhiasan dan lain sebagainya.
- c. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, seperti salon kecantikan, tukang pangkas rambut, laundry, jasa permak pakaian dan lain sebagainya.

Pada tahun 2017 nilai tambah bruto kegiatan ini tercatat sebesar 441.672,21 juta rupiah adh berlaku dan 346.233,86 juta rupiah adh konstan. Sedangkan pertumbuhan kegiatan ini pada tahun 2017 tercatat sebesar 8,48 persen. Dan andil lapangan usaha ini terhadap PDRB Tercatat sebesar 2,03 persen.



## **BAB V PENUTUP**

Besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2017 tercatat sebesar 21.797,10 milyar rupiah atau terjadi pertumbuhan sebesar 9,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Demikian hingga PDRB perkapita Kabupaten Blora tercatat sebesar 25.277.834 rupiah, dan apabila Migas dikeluarkan PDRB perkapitanya tercatat sebesar 19.577.051 rupiah.

Atas dasar harga konstan (2010=100), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora tahun 2017 tercatat sebesar 5,84 persen, atau senilai 16.843,36 milyar rupiah. Lapangan usaha Jasa Lainnya tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,48 persen, selanjutnya adalah pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah lapangan usaha Pertambangan Penggalian memiliki pertumbuhan sebesar 7,93 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan yang tumbuh sebesar 2,08 persen.

Pada tahun 2017 tersebut, sumbangan terbesar untuk PDRB adalah lapangan usaha Pertambangan Penggalian yang tercatat sebesar 24,12 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang tercatat sebesar 23,33 persen. Urutan berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang tercatat sebesar 15,16 persen serta lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,80 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04 persen.

Inflasi PDRB tahun 2017 tercatat sebesar 3,00 persen, lebih besar dibandingkan inflasi PDRB tahun sebelumnya yang tercatat sebesar minus 1,12 persen.

# Lampiran Tabel

<https://blorakab.bps.go.id>





Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017  
 (JUTAAN RUPIAH)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.053.079,36	4.204.445,08	4.628.758,69	4.900.082,01	5.085.563,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1.868.646,20	2.215.738,66	2.301.811,79	4.660.168,62	5.257.663,56
C	Industri Pengolahan	1.391.426,30	1.702.859,80	1.772.198,43	1.932.856,98	2.135.739,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.370,18	10.100,66	10.803,38	11.892,05	13.382,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	6.044,91	6.485,07	6.947,18	7.525,55	8.122,68
F	Konstruksi	556.847,32	642.981,32	720.693,66	796.289,47	888.573,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	2.286.694,89	2.479.806,57	2.696.049,57	3.028.918,81	3.303.964,99
H	Transportasi dan Pergudangan	352.390,23	415.625,22	468.228,85	511.509,19	569.766,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447.175,46	515.685,80	576.714,11	642.678,96	705.379,74
J	Informasi dan Komunikasi	153.280,11	166.227,55	179.214,14	191.502,47	211.925,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	433.246,02	482.138,64	540.804,40	599.487,65	662.022,28
L	Real Estate	179.074,80	206.964,44	228.930,16	246.212,68	266.989,33
M,N	Jasa Perusahaan	39.092,48	44.499,21	51.359,20	55.631,10	60.460,15
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	527.545,25	568.212,38	627.169,10	683.263,10	719.551,51
P	Jasa Pendidikan	837.460,28	971.762,09	1.042.908,19	1.151.880,39	1.277.292,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.087,79	144.177,23	161.256,83	173.737,54	189.030,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	280.199,94	324.265,54	354.499,37	400.037,73	441.672,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06	19.993.674,30	21.797.101,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		11.756.251,71	13.023.829,11	14.343.891,36	15.644.512,03	16.881.311,05

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017  
 (JUTAAN RUPIAH)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.301.131,01	3.160.245,29	3.242.361,67	3.370.510,28	3.482.831,69
B	Pertambangan dan Penggalan	1.693.313,80	1.803.359,69	2.008.086,98	4.411.934,83	4.761.607,15
C	Industri Pengolahan	1.171.962,66	1.317.483,13	1.306.210,27	1.365.669,75	1.440.641,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.931,80	10.451,21	10.660,98	11.231,43	11.621,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	5.953,47	6.244,62	6.384,88	6.553,96	6.969,93
F	Konstruksi	489.298,12	513.719,99	551.441,68	593.724,42	642.225,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	2.090.326,81	2.207.299,95	2.337.147,00	2.520.537,09	2.656.490,73
H	Transportasi dan Pergudangan	344.916,24	381.365,59	411.529,04	445.804,82	467.442,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	416.432,15	453.923,85	487.195,72	514.442,62	547.258,50
J	Informasi dan Komunikasi	161.629,08	182.696,82	197.618,67	210.195,25	223.363,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	357.982,94	378.915,37	408.234,24	439.207,69	465.146,47
L	Real Estate	175.834,75	191.350,14	204.632,25	216.219,20	228.083,98
M,N	Jasa Perusahaan	34.076,13	37.687,76	40.726,49	42.423,47	44.484,19
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	447.597,35	452.716,05	479.617,15	495.876,04	506.181,72
P	Jasa Pendidikan	646.701,86	729.250,66	770.590,03	818.590,53	872.932,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.586,00	115.090,34	123.226,33	131.331,73	139.845,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	262.830,70	285.400,80	296.924,34	319.178,96	346.233,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		10.093.016,31	10.516.216,81	11.050.744,30	11.685.075,51	12.278.655,67

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,93	27,84	28,28	24,51	23,33
B	Pertambangan dan Penggalian	13,80	14,67	14,06	23,31	24,12
C	Industri Pengolahan	10,27	11,28	10,83	9,67	9,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengad Air, Pengel Sampah, Limbah dan Daur Ula	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,11	4,26	4,40	3,98	4,08
G	Perdagn Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Spd Mt	16,88	16,42	16,47	15,15	15,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,75	2,86	2,56	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,41	3,52	3,21	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	1,13	1,10	1,09	0,96	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,19	3,30	3,00	3,04
L	Real Estate	1,32	1,37	1,40	1,23	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,31	0,28	0,28
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	3,90	3,76	3,83	3,42	3,30
P	Jasa Pendidikan	6,18	6,43	6,37	5,76	5,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,95	0,99	0,87	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	2,15	2,17	2,00	2,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		86,80	86,24	87,63	78,25	77,45

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 4. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,18	25,85	25,17	21,18	20,68
B	Pertambangan dan Penggalian	14,46	14,75	15,59	27,72	28,27
C	Industri Pengolahan	10,01	10,78	10,14	8,58	8,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,18	4,20	4,28	3,73	3,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	17,85	18,05	18,14	15,84	15,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,94	3,12	3,19	2,80	2,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	3,71	3,78	3,23	3,25
J	Informasi dan Komunikasi	1,38	1,49	1,53	1,32	1,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,10	3,17	2,76	2,76
L	Real Estate	1,50	1,56	1,59	1,36	1,35
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,31	0,32	0,27	0,26
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	3,82	3,70	3,72	3,12	3,01
P	Jasa Pendidikan	5,52	5,96	5,98	5,14	5,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,94	0,96	0,83	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,24	2,33	2,30	2,01	2,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		86,17	86,01	85,78	73,43	72,90

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 5. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,28	103,73	110,09	105,86	103,79
B	Pertambangan dan Penggalian	107,73	118,57	103,88	202,46	112,82
C	Industri Pengolahan	111,62	122,38	104,07	109,07	110,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	101,91	107,80	106,96	110,08	112,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	105,12	107,28	107,13	108,33	107,93
F	Konstruksi	109,06	115,47	112,09	110,49	111,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	108,65	108,45	108,72	112,35	109,08
H	Transportasi dan Pergudangan	111,32	117,94	112,66	109,24	111,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,02	115,32	111,83	111,44	109,76
J	Informasi dan Komunikasi	106,53	108,45	107,81	106,86	110,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,81	111,29	112,17	110,85	110,43
L	Real Estate	109,34	115,57	110,61	107,55	108,44
M,N	Jasa Perusahaan	118,66	113,83	115,42	108,32	108,68
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	107,70	107,71	110,38	108,94	105,31
P	Jasa Pendidikan	117,61	116,04	107,32	110,45	110,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,20	118,09	111,85	107,74	108,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	113,50	115,73	109,32	112,85	110,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		110,24	111,51	108,39	122,15	109,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		110,49	110,78	110,14	109,07	107,91

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 6. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	102,47	95,73	102,60	103,95	103,33
B	Pertambangan dan Penggalian	107,44	106,50	111,35	219,71	107,93
C	Industri Pengolahan	107,08	112,42	99,14	104,55	105,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	107,79	105,23	102,01	105,35	103,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	102,57	104,89	102,25	102,65	106,35
F	Konstruksi	104,96	104,99	107,34	107,67	108,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	105,31	105,60	105,88	107,85	105,39
H	Transportasi dan Pergudangan	110,38	110,57	107,91	108,33	104,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,58	109,00	107,33	105,59	106,38
J	Informasi dan Komunikasi	110,47	113,03	108,17	106,36	106,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,14	105,85	107,74	107,59	105,91
L	Real Estate	108,06	108,82	106,94	105,66	105,49
M,N	Jasa Perusahaan	113,47	110,60	108,06	104,17	104,86
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	102,41	101,14	105,94	103,39	102,08
P	Jasa Pendidikan	109,68	112,76	105,67	106,23	106,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,21	112,19	107,07	106,58	106,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	110,01	108,59	104,04	107,50	108,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		105,36	104,39	105,36	123,53	105,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		105,10	104,19	105,08	105,74	105,08

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129,33	134,16	147,70	156,36	162,28
B	Pertambangan dan Penggalian	132,45	157,05	163,15	330,31	372,67
C	Industri Pengolahan	142,06	173,85	180,93	197,34	218,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	124,93	134,67	144,04	158,55	178,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	108,43	116,33	124,62	134,99	145,70
F	Konstruksi	133,32	153,95	172,55	190,65	212,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	127,31	138,06	150,10	168,63	183,94
H	Transportasi dan Pergudangan	123,44	145,59	164,02	179,18	199,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,47	141,23	157,95	176,02	193,19
J	Informasi dan Komunikasi	127,36	138,12	148,91	159,12	176,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	138,11	153,70	172,40	191,11	211,04
L	Real Estate	124,20	143,54	158,78	170,76	185,17
M,N	Jasa Perusahaan	153,83	175,10	202,10	218,91	237,91
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	123,67	133,21	147,03	160,18	168,69
P	Jasa Pendidikan	206,68	239,82	257,38	284,27	315,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,96	181,81	203,35	219,09	238,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	120,39	139,33	152,32	171,88	189,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		133,45	148,80	161,28	197,00	214,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		133,81	148,23	163,26	178,06	192,14

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105,34	100,84	103,46	107,55	111,14
B	Pertambangan dan Penggalian	120,02	127,82	142,33	312,72	337,50
C	Industri Pengolahan	119,65	134,51	133,36	139,43	147,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	132,42	139,34	142,14	149,74	154,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	106,79	112,01	114,53	117,56	125,02
F	Konstruksi	117,15	123,00	132,03	142,15	153,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	116,37	122,89	130,12	140,33	147,89
H	Transportasi dan Pergudangan	120,82	133,59	144,15	156,16	163,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,05	124,32	133,43	140,89	149,88
J	Informasi dan Komunikasi	134,30	151,80	164,20	174,65	185,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	114,12	120,79	130,14	140,01	148,28
L	Real Estate	121,95	132,71	141,93	149,96	158,19
M,N	Jasa Perusahaan	134,09	148,30	160,26	166,94	175,04
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	104,93	106,13	112,44	116,25	118,67
P	Jasa Pendidikan	159,60	179,97	190,17	202,02	215,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,37	145,13	155,39	165,61	176,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	112,93	122,63	127,58	137,14	148,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		115,40	120,48	126,93	156,80	165,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		114,88	119,69	125,78	133,00	139,75

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Tabel 9. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,28	3,73	10,09	5,86	3,79
B	Pertambangan dan Penggalian	7,73	18,57	3,88	102,46	12,82
C	Industri Pengolahan	11,62	22,38	4,07	9,07	10,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,91	7,80	6,96	10,08	12,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	5,12	7,28	7,13	8,33	7,93
F	Konstruksi	9,06	15,47	12,09	10,49	11,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	8,65	8,45	8,72	12,35	9,08
H	Transportasi dan Pergudangan	11,32	17,94	12,66	9,24	11,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	15,32	11,83	11,44	9,76
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	8,45	7,81	6,86	10,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,81	11,29	12,17	10,85	10,43
L	Real Estate	9,34	15,57	10,61	7,55	8,44
M,N	Jasa Perusahaan	18,66	13,83	15,42	8,32	8,68
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	7,70	7,71	10,38	8,94	5,31
P	Jasa Pendidikan	17,61	16,04	7,32	10,45	10,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,20	18,09	11,85	7,74	8,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,50	15,73	9,32	12,85	10,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		10,24	11,51	8,39	22,15	9,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		10,49	10,78	10,14	9,07	7,91

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 10. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,47	(4,27)	2,60	3,95	3,33
B	Pertambangan dan Penggalian	7,44	6,50	11,35	119,71	7,93
C	Industri Pengolahan	7,08	12,42	(0,86)	4,55	5,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,79	5,23	2,01	5,35	3,48
E	Pengadaan Air, Pengel Sampah, Limbah	2,57	4,89	2,25	2,65	6,35
F	Konstruksi	4,96	4,99	7,34	7,67	8,17
G	Perdag Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Spd Mot	5,31	5,60	5,88	7,85	5,39
H	Transportasi dan Pergudangan	10,38	10,57	7,91	8,33	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	9,00	7,33	5,59	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	10,47	13,03	8,17	6,36	6,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	5,85	7,74	7,59	5,91
L	Real Estate	8,06	8,82	6,94	5,66	5,49
M,N	Jasa Perusahaan	13,47	10,60	8,06	4,17	4,86
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	2,41	1,14	5,94	3,39	2,08
P	Jasa Pendidikan	9,68	12,76	5,67	6,23	6,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,21	12,19	7,07	6,58	6,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,01	8,59	4,04	7,50	8,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		5,36	4,39	5,36	23,53	5,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		5,10	4,19	5,08	5,74	5,08
JAWA TENGAH		5,11	5,28	5,47	5,28	5,28

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Tabel 11. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2013 - 2017 (%)  
(TAHUN 2010 =100)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	122,78	133,04	142,76	145,38	146,02
B	Pertambangan dan Penggalian	110,35	122,87	114,63	105,63	110,42
C	Industri Pengolahan	118,73	129,25	135,67	141,53	148,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94,35	96,65	101,34	105,88	115,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	101,54	103,85	108,81	114,82	116,54
F	Konstruksi	113,81	125,16	130,69	134,12	138,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	109,39	112,35	115,36	120,17	124,37
H	Transportasi dan Pergudangan	102,17	108,98	113,78	114,74	121,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,38	113,61	118,37	124,93	128,89
J	Informasi dan Komunikasi	94,83	90,99	90,69	91,11	94,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121,02	127,24	132,47	136,49	142,33
L	Real Estate	101,84	108,16	111,87	113,87	117,06
M,N	Jasa Perusahaan	114,72	118,07	126,11	131,13	135,91
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	117,86	125,51	130,76	137,79	142,15
P	Jasa Pendidikan	129,50	133,25	135,34	140,72	146,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,01	125,27	130,86	132,29	135,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	106,61	113,62	119,39	125,33	127,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		115,63	123,51	127,06	125,64	129,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		116,48	123,85	129,80	133,88	137,49

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 12. LAJU IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2013-2017 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,60	8,36	7,30	1,84	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	11,34	(6,71)	(7,85)	4,54
C	Industri Pengolahan	4,24	8,86	4,97	4,32	4,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(5,45)	2,44	4,85	4,49	8,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	2,49	2,28	4,77	5,53	1,49
F	Konstruksi	3,91	9,98	4,42	2,62	3,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	3,16	2,70	2,68	4,17	3,50
H	Transportasi dan Pergudangan	0,85	6,67	4,40	0,84	6,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	5,80	4,20	5,54	3,17
J	Informasi dan Komunikasi	(3,57)	(4,06)	(0,33)	0,46	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,44	5,14	4,11	3,03	4,27
L	Real Estate	1,19	6,20	3,43	1,79	2,80
M,N	Jasa Perusahaan	4,57	2,92	6,80	3,98	3,65
O	Administrasi Pem, Pertah dan Jam Sos Wjb	5,17	6,49	4,18	5,37	3,17
P	Jasa Pendidikan	7,24	2,90	1,56	3,97	3,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,72	5,26	4,46	1,09	2,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,17	6,57	5,08	4,98	1,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)		4,63	6,81	2,87	(1,12)	3,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)		5,13	6,32	4,81	3,15	2,69

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2017

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6
PDRB (Juta Rupiah)	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06	19.993.674,30	21.797.101,52
PDRB TANPA MIGAS (Juta Rupiah)	11.756.251,71	13.023.829,11	14.343.891,36	15.644.512,03	16.881.311,05
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	842.325	846.407	850.229	854.068	862.301
<i>PDRB PER KAPITA DGN MIGAS (Rupiah)</i>	16.078.902,50	17.842.461,35	19.251.692,26	23.409.932,58	25.277.833,98
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MIGAS (Rupiah)</i>	13.956.907,03	15.387.203,56	16.870.621,17	18.317.642,20	19.577.051,46

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA KABUPATEN BLORA  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010=100) TAHUN 2013 - 2017

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6
PDRB (Juta Rupiah)	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54
PDRB TANPA MIGAS (Juta Rupiah)	10.093.016,31	10.516.216,81	11.050.744,30	11.685.075,51	12.278.655,67
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	842.325	846.407	850.229	854.068,00	862.301,00
<i>PDRB PER KAPITA DGN MIGAS (Rupiah)</i>	13.904.971,19	14.446.015,34	15.151.903,43	18.632.511,74	19.533.040,71
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MIGAS (Rupiah)</i>	11.982.330,23	12.424.546,38	12.997.374,00	13.681.668,81	14.239.407,90

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 15. PDRB Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 - 2017 (Jutaan Rupiah)

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Harga Berlaku</b>					
1. Sektor Primer	5.921.725,57	6.420.183,74	6.930.570,49	9.560.250,64	10.343.227,26
2. Sektor Sekunder	1.963.688,71	2.362.426,85	2.510.642,64	2.748.564,05	3.045.817,76
3. Sektor Tersier	5.658.247,26	6.319.364,68	6.927.133,93	7.684.859,61	8.408.056,49
Total PDRB	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06	19.993.674,30	21.797.101,52
<b>B. Harga Konstan 2010</b>					
1. Sektor Primer	4.994.444,80	4.963.604,99	5.250.448,64	7.782.445,11	8.244.438,84
2. Sektor Sekunder	1.677.146,05	1.847.898,96	1.874.697,82	1.977.179,55	2.101.458,89
3. Sektor Tersier	5.040.914,00	5.415.697,35	5.757.441,24	6.153.807,37	6.497.462,81
Total PDRB	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 16. Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 - 2017 (Persen)

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Harga Berlaku</b>					
1. Sektor Primer	43,72	42,51	42,34	47,82	47,45
2. Sektor Sekunder	14,50	15,64	15,34	13,75	13,97
3. Sektor Tersier	41,78	41,84	42,32	38,44	38,57
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B. Harga Konstan 2010</b>					
1. Sektor Primer	42,64	40,59	40,76	48,90	48,95
2. Sektor Sekunder	14,32	15,11	14,55	12,42	12,48
3. Sektor Tersier	43,04	44,29	44,69	38,67	38,58
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 17. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora  
Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 - 2017  
(Tahun 2000 = 100,00)

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Harga Berlaku</b>					
1. Sektor Primer	130,30	141,27	152,50	210,36	227,59
2. Sektor Sekunder	139,25	167,52	178,03	194,90	215,98
3. Sektor Tersier	134,91	150,67	165,16	183,22	200,47
Total PDRB	133,45	148,80	161,28	197,00	214,77
<b>B. Harga Konstan 2010</b>					
1. Sektor Primer	109,90	109,22	115,53	171,25	181,41
2. Sektor Sekunder	118,93	131,04	132,94	140,20	149,02
3. Sektor Tersier	120,19	129,12	137,27	146,72	154,91
Total PDRB	115,40	120,48	126,93	156,80	165,96

Ket : \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 18. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora  
Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 - 2017  
(Tahun sebelumnya = 100,00)

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Harga Berlaku</b>					
1. Sektor Primer	110,14	108,42	107,95	137,94	108,19
2. Sektor Sekunder	110,81	120,31	106,27	109,48	110,81
3. Sektor Tersier	110,15	111,68	109,62	110,94	109,41
Total PDRB	110,24	111,51	108,39	122,15	109,02
<b>B. Harga Konstan 2010</b>					
1. Sektor Primer	104,10	99,38	105,78	148,22	105,94
2. Sektor Sekunder	106,44	110,18	101,45	105,47	106,29
3. Sektor Tersier	106,27	107,43	106,31	106,88	105,58
Total PDRB	105,36	104,39	105,36	123,53	105,84

Ket : \* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 19. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora  
Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2013 - 2017  
(Persen)

Rincian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Harga Berlaku</b>					
1. Sektor Primer	10,14	8,42	7,95	37,94	8,19
2. Sektor Sekunder	10,81	20,31	6,27	9,48	10,81
3. Sektor Tersier	10,15	11,68	9,62	10,94	9,41
Total PDRB	10,24	11,51	8,39	22,15	9,02
<b>B. Harga Konstan 2010</b>					
1. Sektor Primer	4,10	-0,62	5,78	48,22	5,94
2. Sektor Sekunder	6,44	10,18	1,45	5,47	6,29
3. Sektor Tersier	6,27	7,43	6,31	6,88	5,58
Total PDRB	5,36	4,39	5,36	23,53	5,84

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BLORA**

Jalan Rajawali No. 12 Blora Telp/Fax (0296)531191  
email: bps3316@bps.go.id website: blorakab.bps.go.id